

Dr. Rahcmad Budi Suharto.,M.Si

EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA

EKONOMI
SUMBER DAYA MANUSIA

ISBN 978-623-6805-36-7



9 786236 805367

EKONOMI

SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si.



Anggota Ikapi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ekonomi Sumber Daya Manusia

Rahcma**d** Budi Suharto

Samarinda, RV Pustaka Horizon, 2021

viii + 120 hlm.; 17 x 24 cm

ISBN: 978-623-6805-36-7

Ekonomi Sumber Daya Manusia

Penulis:

Rahcma**d** Budi Suharto

ISBN:

978-623-6805-36-7

Desainer sampul:

RBS

Layouter:

RVPH

Penerbit & Percetakan:

RV Pustaka Horizon

Anggota Ikapi

Jl. Perjuangan - Alam Segar 4 No. 73

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

www.pustakahorizon.com

Email: pustakahorizon@gmail.com

WA: 0853-4745-6753

Cetakan Pertama: November 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, juga pemindaian (scan) komputer tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.

Buku ini secara garis besar memuat tentang gambaran umum mengenai Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan. Tanpa pengetahuan dasar ini tidak mungkin untuk mengembangkan studi lanjutan di bidang Sumber Daya Manusia.

Dengan segala keterbatasan waktu dan sumber daya, penyusunan buku ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan dan informasinya selama penyusunan buku ini.

Naskah buku ini juga mendapat beberapa saran dari pemerhati Sumber Daya Manusia antara lain Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si., satu dari Guru Besar pada Universitas Mulawarman Pakar Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Siti Amalia, M.Si, Dr. Juliansyah Roy, M.Si. sebagai pengajar Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan serta kawan-kawan sejawat yang sebidang dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kepada para akademisi yang baik hati ini, penulis mengucapkan banyak terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran yang berharga sehingga penyempurnaan karya ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulis berharap, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengguna sebagai landasan dasar untuk mendalami studi Sumber Daya Manusia lebih lanjut. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini akan terus disempurnakan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran-saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku *Ekonomi Sumber Daya Manusia* ini. Dengan senang hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga karya ini dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang masalah Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Samarinda, 28 Oktober 2021

Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si.

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar isi.....	vii
Bab I Dinamika Kependudukan	1
Bab II Struktur Ketenagakerjaan Indonesia	9
Bab III Perkembangan Sektor Formal dan Informal di Indonesia	21
Bab IV Mobilitas dan Migrasi Penduduk	51
Bab V Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.....	63
Bab VI Sumber Daya Manusia di Indonesia	97
Daftar Pustaka	117
Tentang Penulis.....	120

BAB I

DINAMIKA KEPENDUDUKAN

1.1 Definisi Dinamika Kependudukan

Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi yaitu kelahiran, kematian, perpindahan (Bappenas,2013).

Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald & Young (1990) dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau faktor pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk membantu pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan perekonomian di suatu negara (Stephen, et al 2003).

Dinamika penduduk tersebut dapat memengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penduduk semakin besar maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal

bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat pembangunan.

1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Dinamika Penduduk

a. Kelahiran (Fertilitas/Natalitas)

Fertilitas ini berhubungan dengan kelahiran penduduk yang menyangkut jumlah bayi yang lahir hidup. Namun bisa juga fertilitas diukur dari jumlah anak per pasangan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi Fertilitas Faktor sosial, akan memengaruhi fertilitas melalui variabel antara, yang berjumlah 11 variabelantara yang dapat dibedakan menjadi:

1) Faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia produktif.

- a) Umur memulai hubungan kelamin.
- b) Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin.
- c) Lamanya masa reproduksi yang hilang karena: a. perceraian, perpisahan, atau ditinggal pergioleh suami; b. suami meninggal dunia.
- d) Abstinensi sukarela.
- e) Absinensi karena terpaksa (impotensi, sakit, berpisah s ementarayang tidak dapat dihindari).
- f) Frekuensi hubungan seks (tidak termasuk abstinensi)

2) Faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan konsepsi

- a) Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas)yang disengaja.
- b) Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi baikdengan cara kimiawi dan cara mekanis atau cara-cara lain.

- c) Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja, misalnya sterilisasi.

3) Faktor-faktor yang memengaruhi selama kehamilan dan kelahiran

- a) Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja.
- b) Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja.

Kesemua (11) variabel/indikator antara tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap fertilitas atau kelahiran. Kondisi ini akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya akan memengaruhi fertilitas/kelahiran melalui variabel antara.

b. Kematian (Mortalitas)

Mortalitas berkaitan erat dengan tingkat kematian penduduk yang ada pada suatu daerah/wilayah. Tidak semua kejadian kematian dicatat dalam demografi, seperti: jumlah keguguran dan “*still birth*” tidak dihitung sebagai suatu kematian.

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas disuatu wilayah tidak hanya akan memengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk disuatu wilayah, namun juga menjadi sebuah barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk diwilayah yang bersangkutan. Mortalitas atau kematian penduduk adalah salah satu dari variabel demografi yang penting.

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk disuatu daerah tidak hanya memengaruhi jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan kualitas SDM yang ada di tempat tersebut, yang sekaligus juga mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi diwilayah tersebut. Definisi mati adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap

saat setelah terjadi kelahiran hidup. Jadi, mati hanya dapat terjadi setiap terjadi kelahiran hidup.

Adapun sumber data mortalitas yaitu sebagai berikut penjelasannya.

1. Registrasi

Apabila sistem registrasi ini bekerja dengan baik, maka registrasi merupakan sumber data kematian yang ideal. Dalam registrasi kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Namun di Indonesia data hasil registrasi penduduk masih jauh dari memuaskan (banyak peristiwa kematian yang belum tercatat dan kualitas datanya rendah) atau underestimated. Banyak data atau peristiwa yang menyangkut peristiwa vital penduduk seperti kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk tidak dilaporkan oleh penduduk ke tingkat yang paling bawah misalnya lurah atau desa, sehingga jumlah yang dilaporkan akan menjadi jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya terjadi. Jika itu digunakan untuk menghitung peristiwa-peristiwa demografi tertentu, maka nilainya akan rendah yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan untuk program-program tertentu jika menggunakan data yang berasal dari registrasi penduduk akan menghasilkan informasi yang kurang valid.

2. Sensus/survei

Selain data kematian atau mortalitas yang berasal dari data registrasi penduduk, juga terdapat sumber data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menghitung atau mengetahui kondisi mortalitas penduduk. Dalam data sensus penduduk meskipun dilakukan melalui sensus, namun data tentang mortalitas dikumpulkan juga melalui survei atau sensus sampel yang hasilnya

diberlakukan terhadap seluruh populasinya. Tingkat mortalitas yang dihitung berdasarkan data sensus penduduk adalah dengan menggunakan indirect method atau metode tidak langsung dengan menggunakan data rata-rata anak masih hidup dan rata-rata anak yang dilahirkan hidup.

- 1) Rumah sakit.
- 2) Dinas pemakaman.
- 3) Kantor polisi lalu lintas, dan sebagainya.

Data kematian yang diperoleh dari hasil registrasi penduduk, dapat digunakan secara langsung untuk menghitung ukuran-ukuran kematian, seperti diminta oleh metode untung menghitung pengukuran mortalitas. Berbeda halnya dengan data yang bersumber dari hasil registrasi, data yang berasal dari hasil sensus penduduk dan survai dapat digunakan untuk menghitung ukuran-ukuran kematian dengan cara yang tidak langsung (indirect method).

c. **Perpindahan/Gerak Penduduk (Migrasi)**

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah/wilayah ke daerah/wilayah yang lain, baik untuk sementara waktu atau untuk menetap dalam waktu yang lama. Migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi nasional yang merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara, dan migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain.

1.3 Metode Dasar dan Rumus

Dalam perhitungan perubahan jumlah penduduk: "*balancing quation*" Persamaan keseimbangan:

$$a) P1+(B-D)+(I-E)=P2$$

- b) P1 = penduduk waktu 1 (awal)
- c) P2 = penduduk waktu 2 (akhir)
- d) B = kelahiran; D = kematian
- e) I = imigrasi masuk
- f) E = emigrasi (emigrasi keluar)

1. Tingkat Pertambahan Alamiah

- a) *Rate Of Natural Increase* adalah tingkat pertambahan atau pengurangan penduduk pada waktu tertentu karena karena surplus atau defisit dari kelahiran terhadap kematian, disajikan dalam persen dari populasi dasar.
- b) Perubahan jumlah penduduk dalam hal ini tidak melibatkan imigrasi/emigrasi.

c) Rumus

Tingkat pertambahan alamiah :

$$\frac{\text{Jumlah kelahiran} - \text{jumlah kematian}}{\text{jumlah penduduk} \times 100} \times 100$$

d) Contoh :

Polandia (1996)

Jumlah kelahiran : 429.000 kelahiran Jumlah kematian :

386.000 kematian Total penduduk : 38.609.400 jiwa

Tingkat pertambahan alamiah :

429.000-386.000

$$\frac{429.000 - 386.000}{38.609.400} \times 100 = 0,11$$

e) Rumus lain :

Tingkat pertambahan alamiah: tingkat kelahiran - tingkat kematian

10

f) Tingkat Pertumbuhan

Growth Rate : Merupakan tingkat bertambah atau berkurangnya suatu populasi pada tahun tertentu akibat pertambahan alamiah dan migrasi netto.

g) Rumus :

Tingkat pertumbuhan = $\frac{\text{jumlah kelahiran} - \text{jumlah kematian} + \text{migrasi netto}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Jumlah penduduk

: tingkat pertambahan alamiah + migrasi netto

: *rate of natural increase + net migration rate*

c) *Doubling Time*

Waktu yang dibutuhkan (tahun) oleh penduduk suatu negara/wilayah untuk menjadi dua kali lipat jumlahnya.

d) Rumus 70:

$$\text{Waktu menjadi dua kali lipat} = \frac{70}{\text{Tahun tingkat pertumbuhan (\%)}}$$

Model Pertumbuhan Penduduk

Fertilitas? Mortalitas?	Migrasi		
	Positif	Negatif	Nol
F < M	Naik, Tetap, Stabil	Turun	Turun
F > M	Naik	Naik, Tetap, Stabil	Naik
F = M	Naik	Turun	Tetap

BAB II

STRUKTUR KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Data tentang situasi ketenaga kerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap ‘para pencari kerja’ yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai.

2.1. Konsep Pengukuran Ketenagakerjaan

A. *Gainful Worker Approach*

Gainful worker approach merupakan konsep yang menjelaskan tentang aktivitas ekonomi orang yang pernah bekerja atau biasa dilakukan seseorang (*usual activity*). Contohnya orang yang biasanya sekolah namun pada kondisi sekarang sedang mencari kerja maka hal ini diklasifikasikan sebagai orang yang sekolah. Konsep ini menekankan pada kondisi kebiasaan yang dialami oleh penduduk, misalnya seorang penduduk biasa bekerja sebagai pekerja pabrik tetapi sudah beberapa minggu yang lalu sedangkan saat ini dia tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang baru.

Kelemahan konsep “*Gainful Worker Approach*”:

1. Kita tidak akan dapat mengetahui jumlah data statistik Angkatan kerja yang pasti dalam suatu daerah.
2. Data statistik yang akurat tentang berapa jumlah penduduk yg sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan tidak dapat diketahui.
3. Karena konsep ini tdk punya referensi waktu yang jelas.
4. Seseorang saat dicacah (Sensus) dapat saja mengatakan bekerja, padahal sesungguhnya ia sudah tidak bekerja lagi (sudah berhenti, Pensiun atau dipecat)
5. Karena tidak ada batasan waktu, maka kita tdk tahu kapan ia bekerja.
6. Sebaliknya, orang yang baru bekerja pertama kali, tdk akan tercatat sebagai AK (penduduk yang aktif secara ekonomi).

B. *Labour Force Approach*

Konsep “*Labor Force Approach*” merupakan pengembangan dari konsep “*Gainful Worker Approach*” yang tidak memperhatikan

waktu bekerja atau referensi waktu. Konsep ini sudah menjelaskan tentang batasan waktu dan kegiatan yang dilakukan seseorang sehingga seseorang dapat dikategorikan bekerja atau sedang mencari kerja. Berdasarkan pendekatan ini, seseorang dapat dikategorikan bekerja jika memenuhi syarat minimal waktu bekerja, namun referensi waktu untuk bisa dikatakan bekerjasangat variatif sehingga angkanya sulit diperbandingkan (Mantra, 2009).

Kelemahan konsep “*Gainful Worker Approach*”:

- a. Dalam kenyataan, kriteria tsb di atas, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya.
- b. Tetapi harus dikompromikan dengan kondisi pasar kerja, baik bagi mereka yang employed maupun yang unemployed
- c. Keduanya mungkin mengandung unsur kegiatan yg tidak aktif.

C. *Labour Utilization Approach*

Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Philip M Hauser untuk memperbaiki konsep labor force, Pendekatan labor utilization dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan konsep angkatan kerja, terutama supaya lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang. Pendekatan dalam konsep ini lebih ditujukan untuk melihat potensi tenaga kerja, apakah telah dimanfaatkan secara penuh. Dengan konsep ini, angkatan kerja dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan penuh (*fully utilized*).
- b. Pemanfaatan kurang (*under-utilized*), karena jumlah jam kerja yang rendah, pendapatan upah atau gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Biasa disebut setengah penganggur. Untuk point a dan b didasarkan pada jumlah jam kerja seminggu.
- c. Pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Munculnya teori “*labor utilization approach*” adalah dari adanya kelemahan teori ‘*labor force approach*’ dalam hal waktu bekerja juga

yang kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan untuk penetapan standar waktu bekerja terkait pembagian kelompok angkatan kerja. Pembagian kelompok angkatan kerja didasarkan pada jumlah jam kerja yang dilakukan. Orang yang jam kerjanya tinggi disebut sebagai bekerja penuh karena dimanfaatkan penuh sedangkan orang yang kurang dimanfaatkan (*under-utilized*) dikarenakan oleh jumlah jam kerja dalam seminggu rendah. Namun ada pula yang membedakan setengah penganggur karena upah rendah dan setengah penganggur karena pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Secara umum konsep yang terakhir ini sudah mengakomodasi dan menyatakan secara tegas dan jelas akan konsep bekerja sehingga konsep ini merupakan konsep yang dipakai untuk penetapan standar orang bekerja.

2. 2. Kriteria Ketenagakerjaan

1. Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2. Usia kerja (*MAN POWER*)

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

3. Angkatan Kerja (*LABOUR FORCE*)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

4. Bukan angkatan kerja

Penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

5. Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1(satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya.

6. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan kondisi ketika penduduk sudah tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

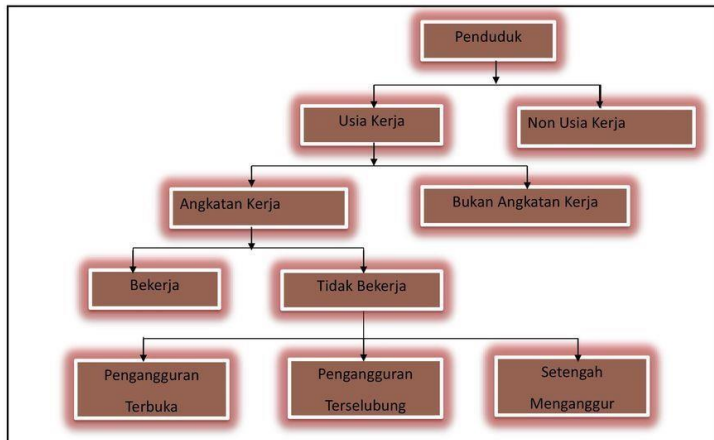
7. Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung, berdasarkan definisi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), adalah keadaan menganggur suatu angkatan kerja yang tidak dilaporkan karena mereka tidak giat mencari kerja.

8. Setengah Menganggur

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

BAGAN KETENAGAKERJAAN (ringkas)



2. 3. Macam-Macam Istilah Tenaga Kerja Di Indonesia

- A. Pekerja terdiri atas buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian.
- B. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/ karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan yang sama dalam sebulan terakhir.

Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang

maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk jasa pertanian.

Pekerja Bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Usaha nonpertanian meliputi usaha di sektor: pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyedia akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Pekerjaan Utama Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan utama. Bila pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pekerjaanpekerjaanya dikelola secara terpisah. Lapangan Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

Upah/Gaji Bersih adalah imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama, yang terdiri dari komponen upah/gaji pokok dan

tunjangan, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.

Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan.

Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Tidak termasuk tunjangan:

- upah lembur
- tunjangan makan
- tunjangan transportasi
- tunjangan hari raya
- tunjangan istri
- tunjangan anak
- bonus tahunan
- bonus semesteran
- bonus kuartalan
- bonus prestasi, dll.

Catatan: Tunjangan yang diberikan secara rutin bersamaan dengan pembayaran upah/gaji pokok dan tidak dapat dipisahkan, tetap dimasukkan ke dalam komponen upah/gaji pokok dan tunjangan. Pendapatan Bersih Sebulan yang Lalu adalah imbalan/balas jasa selama sebulan yang lalu, baik berupa uang maupun barang yang diperoleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di nonpertanian. Untuk pekerja bebas di pertanian atau nonpertanian, apabila pada

saat pencacahan ia hanya bekerja selama seminggu yang lalu atau beberapa hari, maka isian pendapatan yang dicatat besarnya sesuai yang diterima dari pekerjaan seminggu atau beberapa hari tersebut.

Jumlah Jam Kerja Seminggu adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. Bagi para buruh/karyawan/pegawai yang biasanya mempunyai jam kerja yang tetap, penghitungan jam kerja harus dikurangi jam istirahat resmi maupun jam meninggalkan kantor/bolos. Bila melakukan lembur, maka jam kerjanya harus dihitung. Pedagang keliling jam kerjanya dihitung mulai dari menyiapkan usaha, berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi jam kerja yang digunakan untuk kegiatan lain, seperti mampir ke rumah famili/kawan, istirahat, mengurus KTP dan sebagainya.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Jenis Pekerjaan/Jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah. Anggota rumahtangga termasuk juga kepala rumah tangga.

SEKILAS INFORMASI TENTANG TENAGA KERJA DI INDONESIA

Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2020 mencapai 2,67 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar 2,55 juta rupiah. Terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata pendapatan bersih

sebulan pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian dibandingkan dengan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai.

Pada Februari 2020, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian masing-masing sebesar 1,07 juta rupiah dan 1,76 juta rupiah. Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai mencapai 2,92 juta rupiah pada Februari 2020. Secara nominal, baik rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja maupun buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan dibandingkan keadaan Februari 2019. Pada Februari 2020, dari 17 kategori pekerjaan utama, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja tertinggi terdapat di Kategori B (Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,60 juta yang diikuti Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi) masing-masing sebesar 4,15 juta rupiah dan 4,06 juta rupiah. Sementara upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja terendah terdapat di Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sebesar 1,48 juta rupiah.

Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja yang dirinci menurut provinsi pada Februari 2020 memperlihatkan adanya variasi yang tinggi, berkisar antara 2,03 juta rupiah sampai dengan 4,53 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (4,53 juta rupiah), Kepulauan Riau (3,98 juta rupiah), dan Papua (3,83 juta rupiah). Sedangkan pada buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/gaji bersih sebulan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (4,59 juta rupiah), Kepulauan Riau (4,07 juta rupiah), dan Papua (3,98 juta rupiah). Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2020 adalah 42 jam, sama jika dibandingkan periode Februari 2019. Untuk buruh/karyawan/pegawai, rata-rata jam kerja seminggu pada Februari 2020 yaitu 43 jam, lebih besar

dibandingkan periode Februari 2019 yaitu 42 jam.

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2020 yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (Umum/Kejuruan) ke atas berkisar antara 2,78 juta rupiah sampai dengan 4,56 juta rupiah. Mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama ke bawah rata-rata upah/gaji bersih sebulan berkisar antara 1,19 juta rupiah sampai dengan 2,15 juta rupiah.

BAB III

PERKEMBANGAN SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DI INDONESIA

Masalah utama yang dihadapi kebanyakan Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (*unskilled*) bagi pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban pembangunan, justru menjadi modal pembangunan. Dengan demikian peran sektor formal dan informal sangat penting dalam menyerap tenaga kerja, sehingga tidak adanya pengangguran. Namun peran sektor informal lebih besar, karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat keterampilan yang tinggi. Bahkan sektor informal bisa menjadi wadah pengembangan Sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang tidak terlatih tersebut dapat meningkatkan keterampilannya dengan memasuki sektor informal terlebih dahulu sebelum masuk ke sektor formal.

Perilaku sektor formal yang kikir dalam penyerapan tenaga kerja itu, justru membawa dampak positif bagi sektor informal. Bagaimana tidak sektor informallah yang diharapkan dapat menjadi sektor yang dapat menyerap angka pengangguran yang cukup

besar. Melihat gejala seperti ini, mestinya para pengambil keputusan di pemerintah menjadikan sektor ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri untuk membalikkan arah pembangunan ekonomi dari yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemerataan ekonomi. Namun keduanya tetap berjalan seiring, bukannya kita menjadi apriori terhadap pertumbuhan.

Membengkaknya sektor informal di kota-kota besar juga sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota besar. Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan penghasilan yang diharapkan, meskipun harapan tersebut sering mleset dari kenyataan. Akibatnya, para migran yang tidak dapat masuk sektor formal di kota terlempar keluar, kemudian migran tersebut berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk kedalamnya. Karena itu, sektor informal dikenal juga sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan.

Sektor informal sering dipandang sebagai sektor transisi bagi tenaga kerja dari sektor pertanian di desa ke sektor industri di kota. Fenomena munculnya sektor informal hanyalah bersifat temporer. Akibat keterampilan yang terbatas, para pencari kerja dari desa, pada awal kepindahannya untuk sementara berusaha dan bekerja di sektor informal. Setelah mapan dan berpengalaman mereka akan mengalihkan usahanya ke sektor formal. Disinilah terjadi proses formalisasi sektor informal, di mana terjadi peralihan status usaha yang tadinya informal menjadi formal dan berpindahnya pekerja yang tadinya bekerja di sektor informal ke sektor formal. Namun pada kenyataannya seringkali proses ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah usaha di sektor informal khususnya industri kecil dan industri rumah tangga semakin menjamur. Demikian juga dengan jumlah pekerjanya. Tenaga kerja dari desa

sebagian besar bukan diserap oleh sektor industri tetapi oleh sektor jasa.

Hal tersebut menandakan bahwa usaha yang tadinya berstatus informal tidak berubah menjadi formal. Demikian juga pekerja yang berada di sektor informal tetap berada disektor tersebut. Dengan kata lain, sektor informal bukan menjadi sektor transisi, tetapi justru menjadi sektor yang dituju oleh pencari kerja dari sektor taradisional (pertanian).

3.1 Definisi & Konsep Sektor Formal dan Informal

Di beberapa negara, perekonomian informal terlalu keras atau terlalu fleksibel. Sebagian perekonomian dan tenaga kerja tidak dipersiapkan untuk menghadapi perputaran ekonomi yang cepat. Subsistensi yang berlipat ganda dan praktik-praktik tenaga kerja informal menghasilkan lahan perekonomian yang subur untuk menerapkan kapitalisme neoliberal yang menghasilkan batas batas baru yang sangat luas dalam perekonomian informal di dunia. Para pemilik pabrik di negaranegara dunia ketiga mungkin tidak secara spesifik bertujuan untuk mengeksploitasi sektor informal. Keterpaduan perekonomian informal adalah sebuah keunggulan yang tidak lagi baru di banyak negara. Institus iinstitusi keuangan internasional pun tidak lagi mendorong perubahan dalam sektor informal. Sesungguhnya, institusi-institusi keuangan internasional masih membentuk sektor formal yang selalu meluas (bandingkan dengan Bank Dunia 2006): kebijakan-kebijakan “perdagangan bebas” ditujukan untuk memopulerkan pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia. Namun demikian dalam praktiknya, kapitalisme terus menemukan batas-batas sektor nonformal untuk dieksploitasi, dan pertumbuhan sektor formal bergantung pada pertumbuhan dalam bidang informal secara terus menerus.

Ketenagakerjaan di Indonesia telah cukup lama memperlihatkan serangkaian kualitas yang bermanfaat bagi modal.

Model ketenagakerjaan yang bersifat adaptif, dapat berpindah-pindah, memiliki berbagai keahlian, dan dapat mengatasi setiap masalah. Seperti yang sudah diperdebatkan oleh para analis sektor non-pertanian di daerah perdesaan (White 1976; Padmo 1993, Fernando 1993) dan perekonomian industri di daerah perdesaan (Wolf 1992), keuntungan diperoleh dari super-eksploitasi tenaga kerja yang hak miliknya dicabut dan yang bergantung pada penghasilan rumah tangga untuk memungkinkan pola bekerja yang fleksibel. Kapitalisme global kontemporer terus mencari rakyat jelata yang dapat dieksploitasi, dan pencarian tersebut dimungkinkan oleh sektor informal yang terus meluas di Pulau Jawa.

Literatur ketenagakerjaan umumnya menyebutkan, tenaga kerja informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Sektor informal berada di luar pasar tenaga terorganisasi. Menurut Rusli Ramli (1985), sektor informal merupakan suatu pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan pengakuan dari pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik.

Urip Soewarno dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1979: 39), menyebutkan jenis-jenis pekerjaan sektor informal sebagai berikut:

1. Angkutan: penarik becak, delman, dan grobak.
2. Perdagangan: pedagang kaki lima, pedagang asongan, makanan, minuman, pakaian, barang bekas, alat tulis, dan keperluan rumah tangga.
3. Industri pengolahan: membuat makanan dan minuman, industri kayu, dan bahan bangunan.
4. Bangunan: tukang teraso, kayu, besi, dan batu.
5. Jasa-jasa: tukang jahit, semir sepatu, reparasi arloji, dan radio.

Menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri, tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Karena tidak terorganisir dan tanpa perlindungan negara, maka pekerja informal rawan penindasan dan pemerasan oleh pemberi kerja (majikan) karena mereka bekerja tanpa Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tanpa standar upah yang layak, dan mayoritas tanpa perlindungan jaminan sosial.

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dari 34 juta pekerja yang aktif melakukan iuran, hanya 3% di antaranya yang bekerja di sektor informal. Umumnya pekerja informal berlatar belakang pendidikan rendah dan berupah rendah pula. Buruh tani misalnya sering dibayar berdasarkan kesepakatan umum yang berlaku di daerah setempat atau bahkan dibayar sesuka hati majikan. International Labour Organization (ILO) pada tahun 2010 menyebut pekerja informal sebagai pekerja rentan. Mereka tidak mendapatkan hak dasar layaknya pekerja formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jam kerja serta tunjangan lainnya. Kerentanan tersebut juga semakin terlihat jelas dengan rendahnya produktivitas dan pendapatan yang jauh lebih rendah.

Menurut BPS, upah nominal harian buruh tani nasional pada Januari 2019 sebesar Rp53.604 per hari. Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) Rp88.442 per hari. *Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. Upah riil adalah perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga.* Sebagian besar pekerja informal juga tidak memiliki serikat pekerja sehingga tidak mengetahui hak pekerja seperti upah minimum atau upah

layak dan jaminan sosial. Berbeda dengan tenaga kerja informal, tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja, plus berbagai peraturan pemerintah (PP) dan menteri (Permen) tentang ketenagakerjaan. Hari Buruh (*May Day*) terkesan hanya untuk pekerja formal. Mereka pula yang biasa “meramaikan” Hari Buruh Internasional 1 Mei dengan berbagai kegiatan, terutama aksi demonstrasi.

3.2 Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Angkatan Kerja di Indonesia

Munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian perdesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Oleh karena rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di perdesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal.

Besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat datang dari sektor formal maupun sektor informal. Beberapa karakteristik tersebut dapat memengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk masuk kerja (terserap) oleh sektor informal. Oleh karena itu, kaitan antara sektor informal dan penyerapan angkatan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut.

i. Persyaratan Masuk, angkatan kerja mudah terserap pada sektor

informal karena sektor informal memberikan kebebasan kepada angkatan kerja untuk masuk maupun keluar dari pekerjaan tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya bagi angkatan kerja yang berminat untuk memasuki kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati

- ii. Waktu Kerja, dari segi waktu kerja sektor informal memberikan kebebasan waktu pada angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu kerja ini, angkatan kerja akan lebih fleksibel dalam menjalankan usahanya sehingga siapapun yang memasuki sektor ini dapat memilih waktu yang diinginkan.
- iii. Umur, secara relatif bekerja pada sektor informal tidak memiliki batas umur yang mengikat seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Artinya bekerja di sektor informal tidak terdapat istilah usia produktif atau non produktif. Siapapun yang berminat memasuki sektor ini dalam usia berapapun dapat membuka dan menjalankan usahanya. Dari gambaran ini bagi angkatan kerja yang sudah tidak dipekerjakan di sektor formal (dipensiunkan misalnya) dan masih berminat untuk bekerja dapat terserap pada sektor informal.
- iv. Jenjang Pendidikan, umumnya pekerjaan di sektor informal dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, sehingga bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan formal terbatas (rendah) apalagi buta huruf, yang sulit memasuki sektor formal masih dapat diterima di sektor informal.

Dengan tertampungnya angkatan kerja di sektor informal, mereka dapat dikatakan telah terserap pada sektor informal. Menggaris bawahi keunggulan- keunggulan sektor sektor informal tersebut, maka keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang sebagai hal yang negatif saja tetapi juga harus diperhatikan segi positifnya.

3.3 Perkembangan Sektor Formal dan Sektor Informal di Indonesia

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dan tidak mampu menciptakan pekerjaan yang layak. Setengah pengangguran (*underemployment*) selalu meningkat setiap tahun dan jumlah tenaga kerja informal tetap saja melampaui tenaga kerja formal. Bahkan yang mengkhawatirkan, pada tahun 2013 tenaga kerja informasi meningkat hampir satu juta kerja informal meningkat hampir satu juta orang, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak 4 tahun sebelumnya. Kini jumlah tenaga kerja informal dan underemployment mencapai 103,2 juta orang atau hampir 2,2 kali lipat lebih besar dari tenaga kerja formal dengan kesejahteraan lebih rendah.

Kepesertaan tenaga kerja informal terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan (*jamsostek*) sangatlah mengecewakan karena baru mencapai 0,02%. Hal ini sangat jauh dibandingkan kepesertaan tenaga kerja formal yang mencapai 62,4%, meski capaian ini sebenarnya juga masih jauh dari menggembirakan. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dimulai tahun depan (diawali Program Jaminan Sosial Kesehatan per 1 Januari 2014 dan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan per 1 juli 2015 hingga) kini sangat jauh dari harapan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

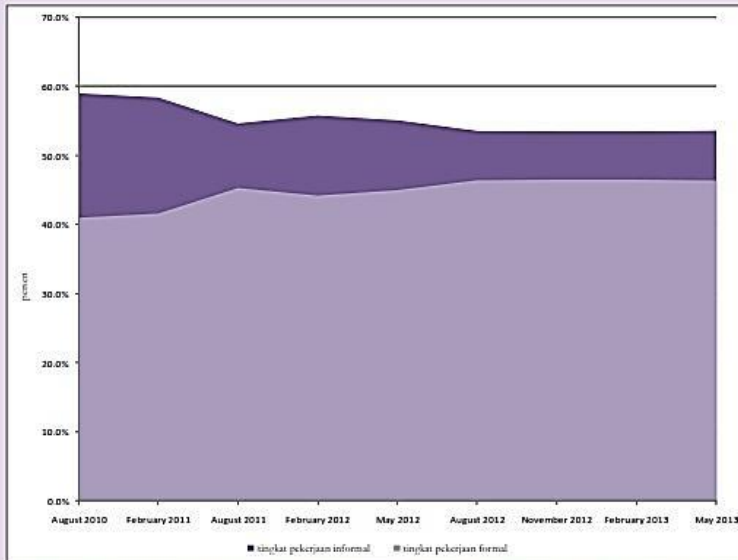
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal, Informal, Setengah Pengangguran dan Pengangguran di Indonesia, Tahun 2004-2013 (juta)



*Keterangan: Data ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakernas 2013)
Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diolah*

Pangsa lapangan kerja dalam perekonomian formal dan informal telah bergeser dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Agustus 2010 diperkirakan bahwa sekitar 59,0 persen dari orang yang dipekerjakan bekerja disektor ekonomi informal. Pada bulan Mei 2013 diperkirakan bahwa 53,6 persen dari pekerjaan berada di sektor ekonomi informal. Pola pertumbuhan ekonomi sejak 2010 mungkin memainkan peran penting dalam pergeseran menuju pekerjaan disektor informal, dan hal ini akan menjadi penting bagi fluktuasi dalam iklim ekonomi makro tidak membalikkan keuntungan yang dibuat dalam formalisasi. Seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini.

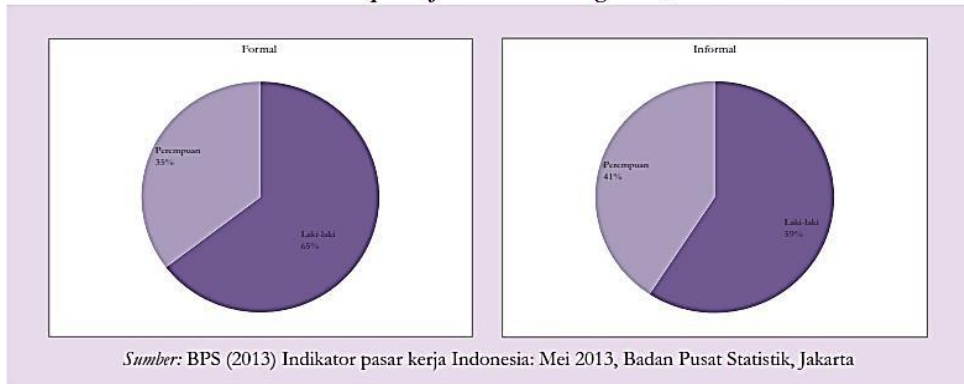
Pekerjaan formal dan informal antara tahun 2010 dan 2013, persen



Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tren menunjukkan bahwa akses laki-laki dan perempuan ke pekerjaan formal telah meningkat dari waktu ke waktu, tapi hasil pada formalitas tersebut dialami secara berbeda di seluruh gender. Pada bulan Mei 2013 ada 53,2 juta pekerja bekerja di sektor formal, dan 35 persennya adalah perempuan, 65 persennya adalah laki-laki. Begitu pula terdapat 61,4 juta pekerja yang bekerja di sektor ekonomi informal dengan 41 persennya adalah perempuan dan 59 persennya adalah laki-laki. Terdapat upaya telah mendukung perempuan dalam mengakses kesempatan kerja di sektor ekonomi formal, seperti kuota gender dalam parlemen dan kerja yang fleksibel, namun upaya lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan gender dan menjamin hasil yang merata baik bagi laki-laki dan perempuan. Perhatikan gambar di berikut ini.

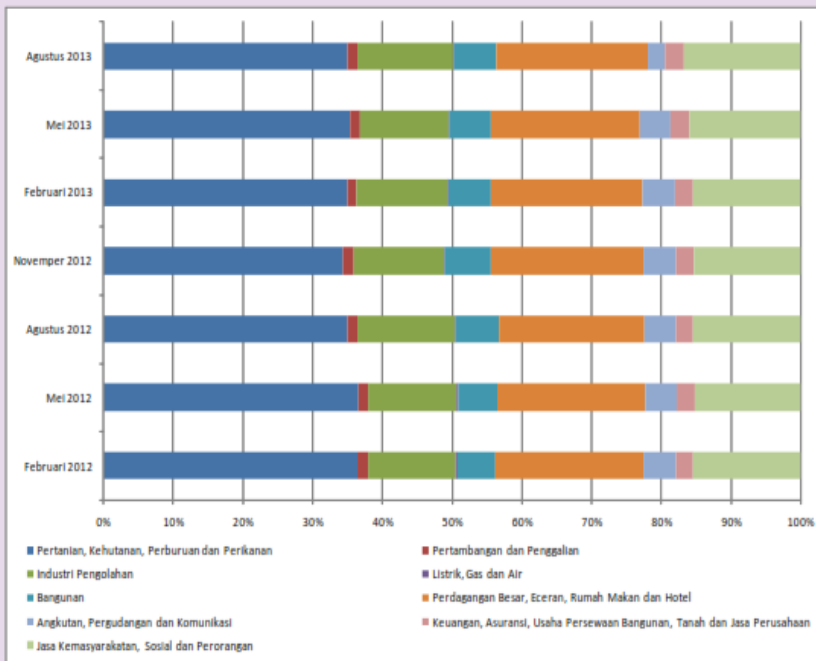
Formalitas atau pekerja berdasarkan gender, Mei 2013



Sektor pertanian masih merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, terhitung 35 persen dari lapangan pekerjaan di bulan Mei dan Agustus 2013. Situasi kerja di sektor pertanian secara relatif tetap stabil pada tahun 2013, dan tidak meningkat seperti masa sebelumnya saat krisis ekonomi. Secara umum, pergeseran struktural pada komposisi pekerjaan dalam perekonomian terus terungkap secara bertahap. Akan tetapi, pekerjaan manufaktur telah menurun dari nilai tinggi dibulan Agustus 2012 yaitu 15,37 juta orang menjadi 14,88 juta orang pada bulan Agustus 2013. Sektor konstruksi juga mengalami penurunan.

Data berikutnya pada tren diperlukan untuk lebih memahami penyebab terjadi penurunan tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

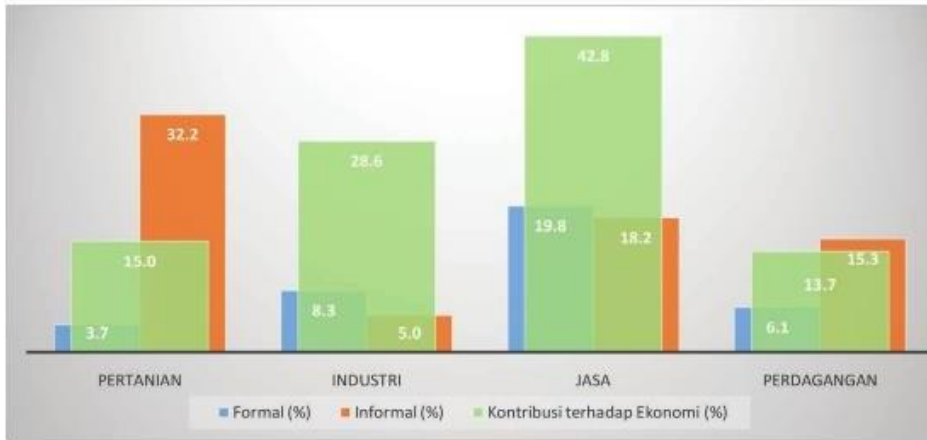
Pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi, 2012-2013 (persen)



Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Masih besarnya kontribusi tenaga kerja informal disektor informal disektor pertanian dalam pasar kerja di Indonesia. Data menunjukkan 32,2 % tenaga kerja di Indonesia adalah tenaga kerja informal yang bekerja di sektor pertanian sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian hanya sebesar 15 % artinya pergeseran struktur ekonomi tidak diikuti oleh perpindahan diserap oleh dua sektor usaha yaitu pertanian dan perdagangan. Seperti yang tergambar dalam gambar berikut ini.

Kontribusi Tenaga Kerja Informal, Formal dan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha di Indonesia, Tahun 2012



Sumber: Sakernas 2012 dan BPS 2013 (diolah)

3.4 Gagalnya Transformasi Ketenagakerjaan

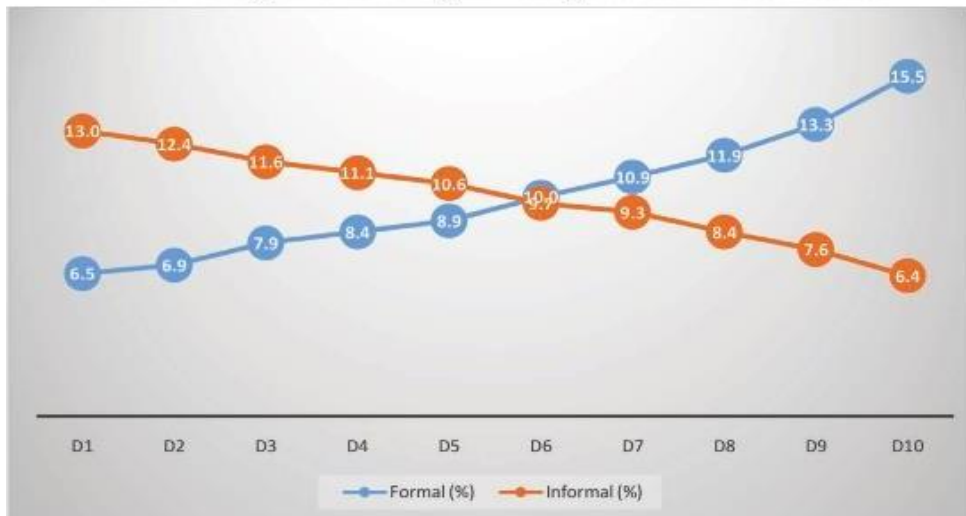
Saat ini tenaga kerja informal di Indonesia mencapai 67,5 juta sedangkan jumlah tenaga kerja formal hanya sebesar 46,6 juta. Struktur tenaga kerja Indonesia disamping masih sangat timpang, ternyata juga amat rentan. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008-2010 yaitu *Global Economic Crisis* (GEC), ternyata meningkatkan secara signifikan pertumbuhan tenaga kerja informal. Jadi setiap tahun kondisi tenaga kerja informal meningkat hampir 8%. Pada saat yang sama, pertumbuhan tenaga kerja formal kurang dari 4%.

Kondisi ini mirip terjadi disaat *Asian Financial Crisis* (AFC) yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Artinya disaat terjadinya krisis atau guncangan ekonomi nasional maka sektor informal menjadi jangkar dari sistem ketahanan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa struktur pasar kerja di Indonesia sangat rentan terhadap dampak krisis ekonomi global dan nasional.

Struktur ketenagakerjaan masih dihadapi masalah. Selain struktur tenaga kerja informal yang besar, ternyata jumlah tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (setengah pengangguran/ underemployment) setiap tahun semakin meningkat. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran ternyata semu karena tenaga kerja informal masih besar dan underemployment setiap tahun meningkat. Permasalahan berikutnya adalah ketidak seimbangan antara struktur ekonomi dengan struktur pasar kerja. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor agraris (cenderung informal) ke sektor industri dan jasa (cenderung formal). Tapi tenaga kerja masih berada pada sektor agraris dan bersifat formal. Ini menandakan gagalnya transformasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pada sisi lain, angkatan kerja di Indonesia juga tumbuh cukup pesat sehingga angkatan kerja yang tidak terserap di sektor formal masuk ke dalam pasar kerja sektor informal. Hal ini dikarenakan dalam pasar kerja sektor informal ada kemudahan keluar dan masuk tenaga kerja.

Bukti kegagalan transformasi dalam pasar kerja formal dapat dilihat pada gambar 2. Pertama, masih besarnya kontribusi tenaga kerja informal di sektor pertanian dalam pasar kerja di Indonesia. Data menunjukkan 32,2 % tenaga kerja di Indonesia adalah tenaga kerja informal yang bekerja di sektor pertanian sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian hanya sebesar 15%. Sedangkan pekerja formal hanya sekitar 6,5%. Pada kelompok desil 10 yang menunjukkan kesejahteraan tertinggi, kondisinya juga sangat timpang. Hanya 6,4% dari total pekerja informal.

Kesenjangan Kesejahteraan
(diukur dari rata-rata pengeluaran rumah tangga/bulan)
antara Pekerja Formal dengan Pekerja Informal di Indonesia



*Keterangan: (D1) sepuluh persen terendah, (D10) sepuluh persen tertinggi
Sumber: Susenas 2011 (diolah)*

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan secara nasional (saat ini, Indonesia berada pada tingkat kesenjangan terparah sejak Indonesia merdeka, indikasi ini terlihat Indeks Gini yang mencapai 0,41) juga berdampak terhadap tingginya jurang kesenjangan kesejahteraan antara pekerja informal. Dengan menggunakan modul pengeluaran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang merupakan proksi dari tingkat kesejahteraan yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur kesejahteraan di Indonesia, kita dapat membandingkan tingkat kesejahteraan antara pekerja formal dengan pekerja informal. Kelompokkan pengeluaran berdasarkan sepuluh kelompok pengeluaran (desil). Desil 1 adalah range tingkat pengeluaran terendah, desil berikutnya lebih tinggi.

Gambar di atas menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan yang tinggi antara pekerja formal dengan pekerja

informal. Sekitar 13% tenaga kerja informal berada pada desil 1 (tingkat kesejahteraan terendah) sedangkan pekerja formal hanya sekitar 6,5%. Pada kelompok desil 10 yang menunjukkan kesejahteraan tertinggi, kondisinya juga sangat timpang. Hanya 6,4% dari total pekerja informal yang berada pada kelompok ini, dibandingkan pekerja formal yang berjumlah 15,5%. Ini menunjukkan kedalaman ketimpangan kesejahteraan antara pekerja formal dengan pekerja informal.

3.5 Eksistensi Sektor Informal

Sejak dimulainya orde baru, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor ekonomi. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan dalam kurun waktu lima tahun (PELITA). Dalam setiap tahapan PELITA pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan secara khusus setiap PELITA bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pembangunan perekonomiannya didukung oleh para pelaku ekonomi, yaitu: (a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (b) Badan Usaha Milik Swasta, dan (c) Koperasi.

Dalam perjalanannya para pelaku tersebut banyak mengalami perkembangan pesat, utamanya badan usaha yang dimiliki swasta. Sampai saat ini BUMS sudah menunjukkan mampu mengangkat tingkat perekonomian di Indonesia secara umum. BUMN yang mengutamakan layanan kepada masyarakat juga masih eksis karena umumnya bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masih mendapatkan subsidi pemerintah. Demikian juga dengan koperasi dari tahun ke tahun ditingkatkan terus upaya pembinaannya dan berkembang terus seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki anggaran, dasar hukum dan manajemen yang jelas, yang mungkin disebut sebagai pelaku sektor formal.

Perkembangan sektor formal semakin pesat yang menimbulkan persaingan di dalam masyarakat untuk berkompetisi masuk ke dalam sektor formal. Bagi masyarakat yang dapat masuk ke dalam sektor formal akan menjadi pelaku ekonomi sektor formal. Tetapi bagi masyarakat yang tidak dapat memasuki sektor formal akan tersingkir dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara individu maupun kelompok secara swadaya. Usaha inilah yang digolongkan ke dalam sektor informal.

Dengan demikian sektor informal merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi sektor ini mempunyai karakteristik yang berbeda di bandingkan dengan sektor formal. Adi Sasono (dalam Edi Swasono, 1985) mengemukakan perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor informal seperti berikut.

Tabel. Karakteristik antara sektor formal dan sektor informal

Karakteristik		Sektor Formal	Sektor Informal
1	Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
2	Teknologi	Padat modal	Padat karya
3	Organisasi	Birokrasi	Mempunyai organisasi keluarga
4	Kredit	Dari lembaga keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
5	Serikat Buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
6	Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada

7	Hubungan dengan desa	<i>One way traffic</i> untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
8	Sifat wiraswasta	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor	Berdikari
9	Persediaan barang	Jumlah besar dan berkualitas baik	Jumlah kecil dan kualitas berubah-ubah
10	Hubungan kerja	Berdasarkan kontak kerja	Berdasarkan asas saling percaya

Tampak bahwa karakteristik antara sektor formal dan sektor informal bertolak belakang. Karena itu sangat diperlukan upaya pembinaan bagi sektor informal agar dapat berkembang dengan baik. Diperlukan pula keberanian bagi para pelaku sektor informal untuk mulai menata dirinya dalam bidang manajemen.

Pandangan senada dari Suharsono Sagir (1989) memberikan batasan sektor informal yaitu kegiatan ekonomi yang bersifat marginal (kecil-kecilan) sebab kegiatannya tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengenal sistem perbankan maupun perkreditan. Meskipun karakteristiknya berbeda, tetapi munculnya sektor informal bukan hanya sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan dan bukan hanya menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor formal semata. Justru sektor informal mampu memsubsidi sektor formal karena sebagai pilar ekonomi, sektor formal cenderung tidak/kurang efisien, sedangkan sektor informal merupakan sektor yang cukup efisien karena lebih mampu menyediakan kebutuhan kehidupan yang lebih murah.

Konsepsi ekonomi tentang sektor informal baru muncul tahun 1969 dan terus dikembangkan pada saat *International Labor Organization (ILO)* mengembangkan program *World Employment*

Program (WEP). Program tersebut bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di negara berkembang, yang pada kenyataannya meskipun telah melaju membangun ekonomi namun tingkat pengangguran di negara berkembang masih tetap tinggi. Sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pengaturan dan perlindungan pemerintah, sebenarnya memiliki makna ekonomi kompetitif, padat karya, memanfaatkan input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemikiran sendiri oleh masyarakat lokal.

3.6 Perkembangan Sektor informal di Indonesia

Tujuan pembangunan jangka panjang (PJP) II di Indonesia pada bidang ekonomi adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang ekonomi sebagai upaya memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat.

Sektor informal di Indonesia sebagai suatu kegiatan ekonomi sering dikatakan sebagai massa pinggiran, berada dalam keadaan ekonomi lemah. Keberadaannya sering dipandang sebagai sumber permasalahan, khususnya bagi pemerintah daerah yang berwenang mengurus kebersihan dan ketertiban. Namun keberadaan sektor informal pada dasarnya merupakan penyelamat masalah ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka pengangguran di Indonesia pada Pebruari 2008 menurun di

bandingkan Pebruari 2007 dan Agustus 2007 (Kompas, 16 Mei 2008). Jumlah pengangguran pada Pebruari 2008 sebesar 9,43 juta orang berkurang 584.000 dibandingkan Agustus 2007 atau berkurang 1,12 juta orang dibandingkan jumlah pengangguran pada Pebruari 2007 yang mencapai 10,55 juta orang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia dapat diselamatkan antara lain oleh keberadaan sektor informal yang lebih mampu menyerap tenaga kerja. Meskipun menjadi penyelamat, sektor informal dinilai kurang berkualitas dalam perspektif penyerapan tenaga kerja. Pada umumnya, sektor informal yang menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Dari tahun ke tahun, sekitar 70 persen pekerja di sektor informal, sedangkan 30 persen lainnya di sektor formal.

Di Indonesia sektor informal di cirikan sebagai berikut. (1) kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal, (2) pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha, (3) pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, (4) pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke pedagang kaki lima (PKL), (5) unit usaha mudah bergeser dari sub-sektor ke sub sektor lainnya, (6) teknologi yang digunakan bersifat primitif, (7) model dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, (8) pendidikan yang diperlukan untuk melakukan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, (9) pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mempekerjakan buruh berasal dari keluarga, (10) sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, (11)

hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa – kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (Hidayat dalam F.R. Karompis, 2006).

Mengkaji ciri-ciri tersebut di atas dan melihat daya serap sektor informal dalam penggunaan SDM, menunjukkan bahwa dengan segala kelemahannya sektor informal ternyata mampu berperan dalam upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, masalah kemiskinan, yang selanjutnya berperan pula dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Seperti yang diumumkan oleh Menteri Negara PPN/ kepada Bappenas Paskah Suzetta pada 4 Juli 2008 yang menilai bahwa sektor industri informal menjadi pendorong menurunnya angka kemiskinan. Sesuai hasil survei BPS Maret 2008 (Indonesia.co.id) angka kemiskinan Indonesia menurun menjadi 34,17 juta orang (15 persen dari total penduduk Indonesia) dari 37,17 juta orang pada tahun 2007. Penurunan angka kemiskinan tersebut sebagian besar diserap sektor informal.

Di negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal memang jelas lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor formal. Rata-rata penyerapan tenaga kerja baru di Indonesia mencapai 350 ribu hingga 450 ribu orang setiap satu persen pertumbuhan ekonomi. Realisasi penurunan tingkat kemiskinan tersebut cukup menggembirakan, dan menyikapi pertumbuhan sektor informal yang menggembirakan tersebut pemerintah akan mengawal program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung lebih jauh pertumbuhan sektor informal. Program ini diserahkan pelaksanaannya kepada Kementerian Negara Urusan Mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dialokasikan di berbagai sektor. Dengan KUR diharapkan akan terjadi pertumbuhan sektor informal, bukan hanya untuk sub-sektor manufaktur, tetapi juga untuk sub-sektor pertanian. Menurut data Bappenas, sampai bulan

Januari 2008 pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk program KUR sebesar Rp 851,474 miliar dengan total debitor 13.665, terdiri atas koperasi dan UMKM.

Penyaluran dilakukan melalui enam bank yang ditunjuk pemerintah yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

Mengkaji betapa besar kontribusi keberadaan sektor informal dalam mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan ciri-ciri sektor informal yang cenderung banyak kelemahannya, maka perlu ada upaya untuk melakukan pembinaan secara terus menerus. Pembinaan dapat dilakukan terutama oleh pemerintah, lembaga swasta maupun kelompok masyarakat independen yang peduli terhadap masalah-masalah sosial masyarakat.

3.7 Upaya Pembinaan Sektor Informal dan Formal

Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya sektor informal di Indonesia. Penyebab utama adalah karena surplus tenaga kerja yang sangat besar, utamanya di Pulau Jawa. Adanya keterbatasan tanah dengan pertumbuhan penduduk yang melaju pesat telah membawa masyarakat kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak. Fenomena telah terjadi kemajuan sosial utamanya di bidang pendidikan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, namun belum mampu mengalihkan sektor informal menuju ke sektor formal. Di sisi lain, ditinjau dari sisi ekonomi modern, investasi yang ditanamkan cenderung bersifat padat modal, maka bagi sektor informal hal tersebut tidak sebanding dengan beban yang harus dipikul untuk mampu menyerap tenaga kerja yang semakin besar jumlahnya. Dari sisi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan selama masa pembangunan (pada kurun PELITA)

sangat kondusif bagi pesatnya perkembangan sektor informal. Ketika pemerintah belum mampu memberikan kompensasi bagi para penganggur, para pencari kerja akan lari ke sektor informal karena terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal.

Dari berbagai faktor penyebab tersebut, keberadaan sektor informal sangat beralasan, dan akan semakin besar dan tumbuh terus bebarengan dengan lajunya pertumbuhan penduduk usia kerja. Dari fenomena tersebut maka sektor informal merupakan aset nasional yang perlu mendapat perhatian serius, perlu upaya pembinaan, karena hakekat dari kebijaksanaan pembangunan adalah membangun masyarakat industri seutuhnya yang memiliki hak hidup yang layak.

Upaya pembinaan hendaknya memberikan perhatian utama pada masalah sumber daya manusia (SDM) karena jumlah tenaga kerja sangat besar tapi dalam kondisi kualitas pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang relatif rendah. Upaya pembinaan hendaknya mencakup kepribadian, etika, pengetahuan, bakat, keterampilan dan etos kerja. Selain itu juga diperlukan perhatian terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak di bawah usia kerja dan lanjut usia (lansia).

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor informal, dan pembinaan bidang manajemen. Bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyuluhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem bapak angkat dan lain-lain yang semuanya itu dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta secara terus menerus.

Menurut pandangan P.J. Simanjuntak (dalam Supriyanto: 1995) upaya pembinaan sektor informal dapat dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu: (1) mendorong sektor informal yang ada ke sektor formal, (2) meningkatkan kemampuan yang ada pada usaha sektor yang sama, (3) mengadakan relokasi bagi kegiatan usaha sektor informal, (4) mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek baik ke bidang usaha lain yang mempunyai prospek lebih baik.

Menurut pendekatan pertama, untuk mendorong sektor informal ke sektor formal harus mendapat dukungan modal, pemberian latihan manajemen usaha dan perlu diberikan pelatihan keterampilan usaha yang bersifat teknis. Berbagai kredit telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga swasta seperti Kredit Investasi

Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), memberi pinjaman modal digalakkan sekarang adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya formalisasi sektor informal ini tidak akan berhasil manakala tidak ada upaya perbaikan manajemen khususnya dalam masalah operasional dan pengawasan. Dalam upaya formalisasi sektor informal kapitalisasi yang dilakukan harus mampu menciptakan kapitalisasi yang dapat memasuki mekanisme pasar. Sehingga upaya formalisasi sektor informal ini akan memberikan berkah kemakmuran bagi pelakunya dan bukan hanya sekedar formalisasi semu.

Menurut pendekatan kedua yaitu meningkatkan kemampuan usaha, penerapannya dapat dilakukan dengan cara misalnya: memberikan pelatihan untuk memperkaya desain bagi para pengrajin batik dan pengrajin gerabah di Kasongan Bantul Yogyakarta. Terbukti dengan desain batik yang semakin beragam dan menarik, saat ini pakaian batik sudah semakin banyak diminati oleh segala umur, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa,

orang tua, laki-laki maupun perempuan. Hasil kerajinan gerabah di Kasongan juga semakin bagus kualitasnya karena pengayaan desain dan pewarnaan. Peran pembina juga diperlukan untuk mengupayakan memasak bahan baku dan distribusi untuk pemasarannya. Hampir di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah tumbuh dan berkembang sentra-sentra kerajinan, maka diperlukan upaya pembinaan manajemen, peningkatan kualitas, permodalan dan perluasan pasar. Juga tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah untuk menciptakan regulasi dalam memproteksi hasil produksi dalam negeri (lokal) agar tidak tergilas oleh produk luar negeri atau produk impor.

Menurut pendekatan ketiga, adalah merelokasi kegiatan usaha sektor informal. Pendekatan ini perlu dilakukan, karena pada umumnya keberadaan usaha sektor informal cenderung melanggar norma ketertiban, keindahan, dan gangguan jalan raya. Program relokasi mengupayakan penyediaan tempatkedudukan usaha yang strategis dan menguntungkan, baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak masyarakat konsumen, tanpa mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Misalnya, pemerintah daerah DIJ telah memindahkan pusat penjualan sayur dari Shopping Centre ke pasar Giwangan. Juga kiosisasi pedagang buku di Terban dan bunga di Jl. Ahmad Jazuli, Kotabaru Yogyakarta.

Menurut pendekatan keempat, mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek lebih baik ke bidang usaha lain yang mempunyai prospek lebih baik. Upaya pengalihan usaha pada umumnya sulit dilakukan karena kurangnya keberanian para pengusaha mengambil resiko. Pengalihan usaha hendaknya dilakukan dengan pertimbangan rasional bahwa usaha yang baru akan membawa peluang yang menguntungkan. Agar para pengusaha sektor informal mempunyai kemauan, kemampuan dan keberanian untuk mengalihkan usaha yang memiliki prospek lebih

baik diperlukan upaya pembinaan dengan langkah pembinaan yang cukup bijaksana.

3.8 Kekuatan Sektor Informal

1. Daya Tahan

Selama krisis ekonomi, terbukti sektor informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat. Dari sisi permintaan, akibat krisis ekonomi pendapatan riil rata-rata masyarakat turun drastis dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat, dari barang-barang sektor formal atau impor (yang harganya relatif mahal) ke barang-barang sederhana buatan sektor informal (yang harganya relatif murah). Misalnya, sebelum krisis terjadi, banyak pegawai-pegawai kantoran, mulai dari kelas menengah hingga tinggi makan siang di restoran-restoran mahal di luar kantor. Di masa krisis, banyak dari mereka merubah kebiasaan dari makan siang di tempat yang mahal ke rumah-rumah makan sederhana atau warung-warung murah di sekitar kantor mereka.

Dari sisi penawaran, akibat banyak orang di-PHK-kan di sektor formal selama masa krisis, ditambah lagi dengansulitnya angkatan kerja baru mendapat pekerjaan di sektor formal, maka suplai tenaga kerja dan pengusaha ke sektor informal meningkat. Selain itu, relatif kuatnya daya tahan sektor informal selama krisis, juga dijelaskan oleh tingginya motivasi pengusaha di sektor tersebut dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi banyak pelaku, usaha di sektor informal merupakan satu-satunya sumber penghasilan mereka, sehingga berbeda dengan rekan mereka di sektor formal, pengusaha-pengusaha di sektor informal sangat adaptif menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha mereka.

2. **Padat Karya**

Dibandingkan dengan sektor formal, khususnya usaha skala besar, sektor informal pada umumnya adalah usaha skala kecil bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak, walaupun akibatnya upah tenaga kerja menjadi relatif lebih murah jika dibandingkan di negara-negara lain yang jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari Indonesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain mendukung (seperti kualitas produk yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitas pekerja tinggi), maka upah murah merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki usaha kecil di Indonesia.

3. **Keahlian Khusus (Tradisional)**

Apabila dilihat dari jenis-jenis produk yang dibuat di oleh industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan umumnya sederhana dan tidak membutuhkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian khusus (*traditional skill*). Disinilah keunggulan lain sektor informal, yang dapat membuat mereka bertahan walaupun terdapat persaingan yang ketat dari sektor formal, termasuk impor yang sangat tinggi. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun-temurun.

4. **Permodalan**

Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, investasi di sektor informal rata-

rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor formal. Tentu, besarnya investasi bervariasi menurut jenis kegiatan dan skala usaha.

3.9 Peran Tiga Usaha Formal dalam Perekonomian Indonesia

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai realisasi dari Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah/negara. Badan usaha milik pemerintah pusat disebut BUMN, sementara badan usaha milik pemerintah daerah disebut (BUMD), kedua badan ini berperan untuk melayani kepentingan umum dan mencari kepentingan dalam rangka mengisi kas negara.

Berdasarkan UU RI No. 9 tahun 1969 perusahaan negara yang bergerak digolongkan menjadi tiga jenis yaitu; Perusahaan Jawatan (*PERJAN*), Perusahaan Umum (*PERUM*) dan Perusahaan Perseroan (*PERSERO*).

BUMN diharapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal dari tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Selain itu, BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak dan BUMN bisa menyediakan lapangan kerja sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran dan kegiatan ekspor dari BUMN bisa menambah devisa negara.

b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta adalah perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi diluar perusahaan negara dan koperasi. Peranan BUMS dalam

perekonomian ada 5 yaitu; 1) nasional untuk menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi yang belum tergarap oleh perusahaan negara, 2) membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, 3) meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, 4) membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 5) meningkatkan lapangan pekerjaan dalam upaya mengatasi pengangguran.

c. Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia menurut UU No 25 tahun 1992 pasal 4, sebagai berikut.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soku gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Sementara peran Sektor Usaha informal dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin tingkat kompetisi dan fleksibilitas produksi
- 2) Memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal
- 3) Sektor ini mendorong upah di sektor formal untuk bergerak ke bawah
- 4) Menyediakan harga barang dan jasa yang murah
- 5) Memberi pendapatan yang cukup untuk individu tertentu

- 6) Upah yang murah dengan biaya administrasi/birokrasi yang murah mengakibatkan produktivitas modal sektor ini cukup tinggi
- 7) Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penurunan GDP dapat ditutupi dengan kenaikan yang cepat pada sektor informal

Ada 10 ciri-ciri pokok sektor usaha informal (Hidayat, 1978) yaitu sebagai berikut.

- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia disektor formal
- 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha
- 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jamkerja.
- 4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golonganekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini
- 5) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor
- 6) Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif
- 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil
- 8) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enterprises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
- 9) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungansendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi
- 10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah.

BAB IV

MOBILITAS DAN MIGRASI PENDUDUK

Di Indonesia masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena jumlah penduduk di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk ini diantaranya adalah terjadinya kepadatan penduduk, masalah kemampuan kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat persaingan baik dalam hal mendapatkan pekerjaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang meningkat diikuti persebaran yang tidak merata dan perekonomian yang cenderung terkonsentrasi diperkotaan mendorong masyarakat untuk bermigrasi.

Migrasi sebagai suatu proses perpindahan penduduk mengalami peningkatan, terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Peningkatan arus migrasi ini terutama terjadi dari desa menuju kota. Pada dasarnya migrasi timbul karena adanya perbedaan kondisi alam atau kondisi sosial ekonomi antara daerah yang satu dengan yang lain. Terbatasnya sumber daya alam dan lapangan pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan sosial ekonomi menjadi faktor dominan bagi penduduk meninggalkan daerah asal. Oleh karena hal tersebut, maka terjadi proses migrasi.

Perpindahan penduduk yang sering terjadi adalah perpindahan dari desa menuju kota. Biasanya perpindahan ini ada yang dengan tujuan menetap maupun tidak menetap. Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan lebih pesat dibanding dengan pedesaan karena banyaknya sektor usaha yang bisa dijadikan lapangan pekerjaan seperti industri, transportasi, jasa dan lain-lain. Penggunaan teknologi padat yang berlebihan di kota akan membatasi perluasan kesempatan kerja di sektor industri, dan pada waktu yang sama akan mendorong urbanisasi secara besar-besaran.

Mobilitas penduduk tentunya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas penduduk dan pembangunan akan saling mendukung pembangunan, artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk, dan begitu juga sebaliknya. Tidak terjadi mobilitas penduduk tanpa ada pembangunan. Pada pihak lain, bilamana mobilitas penduduk ke daerah tersebut besar maka intensitas pembangunannya tinggi, dan sebaliknya bilamana arus mobilitas menuju daerah tersebut kecil maka intensitas pembangunannya akan rendah. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang telah mendukung proses pembangunan tersebut.

Pilihan untuk melakukan mobilitas tentu dilandasi oleh beberapa motif. Kebanyakan para ahli menjelaskan bahwa motif seseorang melakukan mobilitas adalah karena motif ekonomi. Diharapkan dengan melakukan mobilitas penduduk, seseorang akan

dapat merubah nasib atau mengirim sumbangan ekonomi bagi keluarga yang ada di daerah asal. Dengan demikian apa yang diharapkan oleh seseorang sebelum melakukan mobilitas mendekati apa yang diharapkan atau yang diinginkan (Soerjadi et.al, 1992). Revenstein (1885), Lee (1966), Todaro (1979), Titus (1982) dan Mantra (2003) berpendapat bahwa motif seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif yang berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah atau perbedaan nilai kefaedahan (place utility) antara dua wilayah.

4.1 Definisi Migrasi

Menurut Rozy Munir dalam buku Dasar-Dasar Demografi, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Ada 2 dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit untuk menentukan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran, tetapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk.

Untuk dimensi daerah secara garis besarnya dibedakan perpindahan antar negara yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang disebut migrasi internasional dan perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara misalnya antar provinsi, kota atau kesatuan administratif lainnya yang dikenal dengan migrasi intern. Perpindahan lokal yaitu perpindahan dari satu alamat ke alamat lain atau dari satu kota ke kota lain tapi masih dalam batas bagian dalam suatu negara misalnya dalam satu Provinsi.

Dalam arti luas, definisi tentang migrasi adalah tempat tinggal mobilitas penduduk secara geografis yang meliputi semua gerakan (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu pula.

Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa "*a migrantis a person who changes his place of residence from one political or administrative area to another*", pengertian ini dikaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanen sebab selain itu dikenal pula "*mover*" yaitu orang yang pindah dari satu alamat ke alamat lain dan dari satu rumah ke rumah lain dalam batas satu daerah kesatuan politik atau administratif, misalnya pindah dalam satu Provinsi.

Migrasi (mobilitas penduduk) merupakan salah satu dari tiga komponen dalam perubahan jumlah penduduk dunia, sedangkan dua komponen lainnya adalah kelahiran dan kematian. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi, (2012) "pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar". Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit dari pada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut.

Migrasi (mobilitas penduduk) adalah pergerakan penduduk yang melewati batas wilayah tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Terdapat dua kategori mobilitas, yaitu mobilitas permanen dan non permanen. Perbedaannya terletak pada tujuan pergerakannya. "jika seorang migran bertujuan atau berniat untuk pindah tinggal secara tetap,

maka migran tersebut dikategorikan sebagai migran permanen, sebaliknya bila tidak mempunyai tujuan pindah tempat tinggal, maka migran tersebut dinamakan migran non permanen, seperti mobilitas sekunder dan mobilitas ulang alik” Mulyadi (2012), Penduduk atau masyarakat yang melakukan migrasi atau mobilitas disebut penduduk migran. Nitisusantri, (2012:138) “seseorang dapat disebut migran apabila orang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik dengan maksud untuk menetap atau tinggal secara terus-menerus selama enam bulan atau lebih atau mereka yang hanya melakukan perjalanan ulang alik”.

Mobilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak. Sedangkan secara etimologis, mobilitas berasal dari bahasa latin yaitu *'mobilis'* yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain; terdapatnya kata sosial pada istilah mobilitas sosial adalah untuk menekankan bahwa istilah tersebut mengandung makna yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial.

Ransford dalam Sunarto (2004:87) menyatakan, dalam sosiologi mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial; *“Social mobility refers to the movement of individuals or groups--up or down--within a social hierarchy”*. Komblum (1988: 172) menyatakan mobilitas sosial adalah perpindahan individu, keluarga atau kelompok sosial dari lapisan ke lapisan sosial lainnya. Dalam perpindahan yang dilakukan dapat memengaruhi status sosial yang dimiliki yaitu bisa naik atau turun, atau bahkan tetap pada tingkat yang sama tetapi dalam pekerjaan yang berbeda.

Mobilitas yang dilakukan oleh seseorang akan menempatkan seseorang tersebut pada suatu kelas sosial (stratifikasi sosial) yang berbeda dari sebelumnya. Pada stratifikasi sosial terdapat

pengkategorian kelas-kelas yang disebut dengan class sistem yang menempatkan mereka masuk pada kelas yang sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Menurut Gitter dalam Susanto (1992: 65) stratifikasi sosial merupakan hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun di mana setiap orang pada setiap saatnya mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain baik secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakatnya. Stratifikasi terjadi dari semakin luasnya masyarakat yang ditandai dengan adanya pembagian kerja.

Pada umumnya dikenal dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal mengacu kepada perpindahan geografis atau tempat tinggal atau juga peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Status sosial pun tetap (sederajat) tanpa kenaikan atau penurunan.

Mobilitas sosial vertikal merupakan peralihan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial orang/individu yang mengalaminya. Mobilitas ini terbagi pula menjadi mobilitas vertikal ke atas (*social climbing*) dan mobilitas vertikal ke bawah (*social sinking*).

Mobilitas vertikal ke atas yaitu naiknya kedudukan/status sosial seseorang; bisa dilakukan dengan berupaya masuk ke dalam kedudukan/status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya atau dengan membentuk kelompok baru yang memungkinkan seseorang bisa menaikkan status sosialnya. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah merupakan kebalikan dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu menurunnya kedudukan/status sosial/derajat seseorang atau sekelompok orang oleh suatu sebab.

4.2 Jenis-jenis Mobilitas

a) Mobilitas Permanen

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Dikutip situs *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)*, secara umum dikenal mobilitas permanen yang terjadi antarwilayah di Indonesia, yakni migrasi internasional dan migrasi internal.

- Migrasi internasional

Proses perpindahan penduduk dari satu negara internasional dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- Imigrasi, adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap.
- Emigrasi, adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana.
- Remigrasi, adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya (negara asal).
- Migrasi Internal, Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Macam Migrasi internal adalah:
 - Urbanisasi, merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa (kota kecil, daerah) ke kota besar.
 - Transmigrasi, merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpendudukan pada ke daerah (pulau) lain yang berpendudukan jarang.

Daerah tujuan transmigrasi di Indonesia biasanya ke Papua, Kalimantan, atau Sumatera. Dalam transmigrasi ada beberapa jenis, yakni:

- Transmigrasi umum, adalah program transmigrasi yang disponsori

dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah.

- Transmigrasi spontan, adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan sendiri. Tapi mendapat bimbingan dan fasilitas dari pemerintah.
- Transmigrasi bedol desa, adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara masal terhadap satu atau beberapa desa pindah ke pulau yang jarang penduduk.

b) Mobilitas Non Permanen

Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas non permanen dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Komutasi, merupakan bentuk mobilitas penduduk non permanen secara ulak-alik (pergi-pulang) tanpa menginap ke tempat yang dituju.

Orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau penglaju.

2. Sirkulasi, merupakan mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Itu disebut juga mobilitas penduduk nonpermanen musiman.

Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa hari, ada juga yang memakan waktu lama.

4.3 Faktor terjadinya Migrasi

Migrasi adalah Perpindahan penduduk orang banyak beranggapan migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat/wilayah ketempat lain dengan berbagai alasan tertentu mereka bermigrasi demi berkelangsungan hidupnya adapun aktor-

faktor manusia itu melakukan imigrasi faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, bencana alam, dan keamanan. Berdasarkan suatu letak dan juga keamanan individual.

Ada berbagai macam sebab terjadinya migrasi disuatu negara. Secara umum factor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah sebagai berikut:

- Faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru
- Faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan bencana
- Faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan, dan konflik antar kelompok
- Faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet (Rusia) yang berfaham komunis
- Faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama, misalnya terjadi antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris
- Faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan untuk irigasi dan PLTA
- Faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Faktor sosial seperti adanya perkawinan campuran.

4.4 Dampak Migrasi Penduduk

Migrasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif pada suatu negara/wilayah. Dampak yang dirasakan sangat tergantung pada kesiapan wilayah tersebut dan kualitas para

migran. Namun, dampak yang diakibatkan oleh migrasi tidak terbatas pada wilayah yang didatangi oleh migran, migrasi juga memengaruhi wilayah asal migran.

a) Dampak Positif

Pada kasus ini, dampak positif akan dilihat dari perspektif global dan lokal. Perspektif global menyoroti dampak positif dari migrasi eksternal masyarakat Indonesia serta imigrasi pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Perspektif lokal akan menyoroti dampak migrasi internal yang dilakukan masyarakat Indonesia antar provinsi, kota, kabupaten, atau satuan wilayah lainnya.

Global:

- Pembentukan komunitas diaspora yang nantinya dapat menjadi tokoh pembangun negeri.
- Pemicu transfer ilmu dari institusi pendidikan dan riset luar negeri
- Menjadi sumber remittance
- Migran asing ekspatriat akan meningkatkan kualitas pekerjaan serta produktivitas dalam bidang-bidang tertentu yang dikuasainya
- Menjadi salah satu sarana pertukaran budaya dan propagasi budaya Indonesia di luar serta budaya luar di Indonesia.

Lokal:

- Menjadi sarana pertumbuhan penduduk bagi *boomtown* dan kota-kota yang konsentrasi industri tinggi Kota-kota tersebut memerlukan pekerja dalam jumlah banyak sehingga perlu migrasi.
- Menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mensuplai tenaga kerja kawasan tinggi Diharapkan migran akan datang ke kota-kota di sekitar KEK untuk berkerja di KEK tersebut.

- Migrasi dapat meningkatkan keberagaman budaya dalam suatu wilayah. Hal ini dikarenakan penduduknya berasal dari berbagai wilayah, sehingga terwujudlah slogan berbeda-beda tetap satu.
- Migrasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Proses migrasi memerlukan banyak uang sehingga memunculkan bisnis-bisnis penunjang seperti travel agent dan jasa pindah rumah.
- Migrasi dapat menjadi sarana pemerataan penduduk jika dikontrol dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait.
- Migrasi menciptakan kebutuhan fasilitas dan perumahan pada wilayah
- Migrasi dapat meningkatkan arus kas kepada daerah asal migran.

Ketika migran tersebut bekerja di kota, dia akan mengirimkan uang ke daerah asalnya untuk menyokong kehidupan keluarga atau orangtuanya. Hal ini meningkatkan sirkulasi uang yang beredar di daerah asal.

b) Dampak Negatif

Sama seperti dampak positif, dampak negatif juga akan dilihat dari dua perspektif, global dan lokal. Perspektif global akan berfokus pada dampak negatif migrasi penduduk luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya, sedangkan lokal akan berfokus pada dampak negatif migrasi penduduk antar satuan wilayah di Indonesia.

Global:

- Migrasi secara global dapat menyebabkan fenomena *brain drain* pada negara asal. Fenomena ini terjadi ketika orang-orang pintar dari negara asal pergi ke negara maju untuk mengejar karir dan pendidikan, namun tidak kembali membangun negeri.
- Migrasi akan menyebabkan konflik antar negara apabila migrasi tersebut

- Dapat menyebabkan degradasi budaya lokal dikarenakan terlalu banyak penduduk asing yang membawa budayanya. Hal ini dapat dilihat di kota-kota Internasional yang sudah menjadi tempat berkumpul orang-orang dari berbagai belahan dunia. Contoh kota tersebut antara lain adalah Denpasar, Jakarta, Bangkok, Chiang Mai, serta kota-kota besar lainnya

Lokal:

- Dapat menyebabkan overpopulasi pada kota-kota besar yang menjadi primadona tujuan migrasi. Contoh yang baik dari fenomena ini adalah Jakarta dan Bandung. Kedua kota ini merupakan kota besar yang memiliki aktivitas ekonomi berkembang dan kualitas hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar. Oleh karena itu, banyak migran yang berdatangan ke kedua kota ini, sehingga industri perumahan tidak cukup sigap dalam memenuhi permintaan rumah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya wilayah kumuh atau *slum area*.
- Dapat menyebabkan *brain drain* secara lokal. Orang-orang hebat dari desa akan cenderung pindah ke kota sehingga tidak dapat membangun desa.
 - Penurunan populasi desa menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial di desa menjadi stagnan. Selain itu, pemerintah juga akan lebih mengabaikannya karena terdapat wilayah wilayah lain yang memilikipopulasi lebih besar dan dianggap lebih penting.
- Migrasi yang terjadi secara besar-besaran dapat mengganggu struktursosial bagi daerah yang didatangi maupun daerah yang ditinggali.

BAB V

PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

5.1 Sejarah Perkembangan Penduduk Dunia

Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Ada 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga kini: 1) Jaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya; 2) Jaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap yang berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang mengubah kehidupan nomaden menjadi kehidupan menetap di daerah pertanian; 3) Jaman ketika dimulai industrialisasi, yaitu sekitar pertengahan abad 17 sesudah masehi, yang ditandai oleh bertumbuhnya pusat-pusat industri dan tumbuhnya kota-kota sebagai tempat permukiman manusia. Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan peradaban manusia tersebut, para ahli memperkirakan jumlah perkembangan penduduk dunia. Angka pertama yang dikemukakan mengenai jumlah penduduk dunia adalah 120.000 orang yang hidup kira-kira satu juta tahun yang lalu. Angka tersebut kemudian berkembang terus seperti berikut.

No	Tahun	Perkembangan jumlah penduduk	Rata-rata pertumbuhan penduduk (%)	Jumlah tahun penduduk menjadi 2 kali lipat (tahun)
1	10000 sm	100 ribu – 10 juta	Lebih rendah dari 0,05	Sangat lama
2	5000 sm	5 – 20 juta	idem	Idem
3	0	200 juta	idem	Idem
4	1300	400 juta	idem	Idem
5	1650	500 juta	0,1	1000
6	1700	600 juta	0,2	300
7	1750	700 juta	0,3	230
8	1800	900 juta	0,4	180
9	1850	1200 juta	0,5	140
10	1900	1600 juta	0,6	120
11	1950	2400 juta	0,8	90
12	1960	2800 juta	1,7	40

Sumber: Disarikan Dari (Yasin & Adioetomo, 2010; Mantra, 2003)

Data tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 1650 tingkat pertumbuhan penduduk dunia sangat rendah atau hampir tidak ada. Setelah tahun tersebut pertumbuhan penduduk dunia mulai terlihat meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan mulai berlangsungnya revolusi industri di negara-negara barat. Era mulai tahun 1650 disebut hingga sekarang dikenal sebagai era kependudukan dunia. Periode 1900-1930 peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar adalah perang dunia pertama, dalam peristiwa tersebut banyak penduduk meninggal akibat perang atau kondisi ekonomi yang buruk. Periode 1930 hingga sekarang merupakan periode peledakan penduduk dunia, terutama setelah perang dunia kedua, kecuali perang tersebut tidak ada lagi peristiwa yang berarti yang menyebabkan kematian penduduk yang besar. Pelayanan kesehatan yang baik terutama berkaitan dengan penemuan antibiotika, penemuan teknologi modern dibidang kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Meningkatnya kesehatan penduduk di negara-negara maju disatu sisi menyebabkan suksesnya penurunan atau pengendalian pertumbuhan penduduk, namun disisi lainnya di negara-negara yang sedang berkembang kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan pesat. Jumlah penduduk dunia yang diperkirakan dunia tahun 1989 oleh LD FE UI sebanyak 5.250 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 2,7 persen per tahun. Penduduk dunia tahun 1988 dari UN sekitar 5.112 juta. Dengan peningkatan penduduk dunia yang semakin pesat seperti data yang telah disampaikan, maka usaha-usaha untuk pengendalian kelahiran menjadi usaha secara internasional yang mencakup hampir semua negara di dunia. Semua usaha-usaha yang dilakukan baik di bidang kelahiran/fertilitas maupun di bidang kesehatan, akan melahirkan sebuah konsep yang disebut transisi demografi.

5.2 Transisi Demografi

Seperti dijelaskan sebelumnya menjelang permulaan abad 20 di beberapa negara barat terjadi penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Pengalaman historis ini melahirkan teori pokok dalam demografi yang disebut sebagai Transisi Demografi. Transisi demografi adalah perubahan- perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian dimulai dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, berangsur-angsur berubah menjadi tingkat kelahiran dan kematian yang rendah.

Tahapan transisi demografi tersebut ada 3 yaitu pra transisi, transisi, dan pasca transisi.

1. Tahap Pra Transisi (*pre transitional*)

Tahap ini dengan ciri-ciri tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, sehingga tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, atau mungkin hampir mendekati 0 persen per tahun. Masa pra transisi ini diperkirakan terjadi sebelum tahun 1650. Pada tahap ini belum ada usaha- usaha untuk mengendalikan kelahiran meskipun kelahiran sangat tinggi, demikian pula dengan melihat kondisi kesehatan yang buruk akibat berbagai hal termasuk kondisi ekonomi yang belum baik, maka menyebabkan tingkat kematian tinggi termasuk tingkat kematian bayi. Kondisi ini tentu menyebabkan masyarakat tidak bergerak menurunkan kelahirannya

2. Tahap Transisi (*Transitional*)

Tahap ini dicirikan oleh penurunan tingkat kelahiran dan kematian, tingkat kematian lebih rendah daripada tingkat kelahiran, mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam katagori sedang atau tinggi. Pada tahap transisi ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

- a. Permulaan transisi, yang dicirikan oleh tingkat kematian menurun tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi. Dengan tingkat kematian yang

menurun dan tingkat kelahiran yang masih tinggi, menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi sedang atau tinggi.

- b. Tahap pertengahan transisi, yang dicirikan oleh tingkat kelahiran dan kematian sama-sama menurun, namun tingkat kematian menurun lebih cepat daripada tingkat kelahiran, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dalam kondisi sedang atau tinggi.
- c. Tahap akhir transisi, yang dicirikan tingkat kematian sudah rendah, sehingga menurun sedikit lagi atau bahkan mungkin tidak berubah, sedangkan angka kelahiran antara sedang dan rendah. Dengan demikian tingkat pertumbuhan antara sedang atau rendah.

3. Tahap Pasca Transisi (Post Transitional)

Tahap ini dicirikan oleh tingkat kematian dan kelahiran keduanya rendah, hampir semuanya mengetahui cara-cara kontrasepsi dan dipraktekkan. Tingkat kelahiran dan kematian (*vital rates*) mendekati keseimbangan. Pertumbuhan penduduk sangat rendah dalam jangka waktu yang panjang. Teori transisi demografi atau transisi vital dikembangkan oleh Warren Thompson dan Frank Notenstein, mereka bekerja berdasarkan pengalaman kelahiran dan kematian di Eropa Barat pada abad ke 17. David Lucas menyatakan bahwa teori tersebut mengandung kelemahan akibat perbedaan pola-pola kelahiran di negara-negara tersebut seperti pada masa pra transisi. Penurunan kelahiran/fertilitas di berbagai negara tersebut juga tidak bersamaan, ada yang terjadi lebih dahulu penurunannya ada yang baru mulai menurun kelahirannya 75 tahun kemudian. Ada juga negara seperti Perancis mengalami penurunan kelahiran dan kematian pada waktu yang bersamaan, yang dimulai pada awal abad ke 19. Negara-negara lain mengalami penurunan kelahiran belakangan dibandingkan dengan negara Perancis. Inilah yang menyebabkan atau alasan bahwa transisi demografi/vital

mengandung kelemahan, akibat perbedaan-perbedaan tersebut, dan tidak sesederhana seperti teori tersebut.

Proses penurunan kelahiran dan kematian tidaklah sesederhana seperti yang disampaikan dalam model transisi demografi/vital yang telah disampaikan. Ada perbedaan kondisi-kondisi di berbagai negara, seperti di eropa penurunan tingkat mortalitas disebabkan oleh meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan di negara-negara sedang berkembang penurunan mortalitas terutama disebabkan oleh efektivitas penggunaan obat- obat modern dan antibiotika. Demikian juga penurunan tingkat fertilitas/kelahiran di negara-negara sedang berkembang lebih disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi yang mantap, pemerintah memang serius terhadap persoalan kependudukan tersebut, sehingga penurunan kelahiran menjadi lebih cepat daripada di negara-negara maju.

Secara umum di negara-negara sedang berkembang, modernisasi lebih dibandingkan dengan industrialisasi sebagai penyebab penurunan fertilitas. Di Indonesia pembangunan keluarga berencana sangat gencar dilaksanakan mulai sekitar tahun 1970-an, di seluruh wilayah yang mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran secara cepat. Demikian pula berbagai program kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak yang mengintervensi penurunan dengan cepat angka kematian bayi, anak, dan kematian ibu. Program perbaikan gizi untuk Balita dilaksnakan dengan baik untuk menurunkan angka kematian anak.

Kematian di Eropa Barat pada abad ke 17. David Lucas menyatakan bahwa teori tersebut mengandung kelemahan akibat perbedaan pola-pola kelahiran di negara-negara tersebut seperti pada masa pra transisi. Penurunan kelahiran/fertilitas di berbagai negara tersebut juga tidak bersamaan, ada yang terjadi lebih dahulu penurunannya ada yang baru mulai menurun kelahirannya 75 tahun

kemudian. Ada juga negara seperti Perancis mengalami penurunan kelahiran dan kematian pada waktu yang bersamaan, yang dimulai pada awal abad ke 19. Negara-negara lain mengalami penurunan kelahiran belakangan dibandingkan dengan negara Perancis. Inilah yang menyebabkan atau alasan bahwa transisi demografi/vital mengandung kelemahan, akibat perbedaan-perbedaan tersebut, dan tidak sesederhana seperti teori tersebut.

Proses penurunan kelahiran dan kematian tidaklah sesederhana seperti yang disampaikan dalam model transisi demografi/vital yang telah disampaikan. Ada perbedaan kondisi-kondisi di berbagai negara, seperti di eropa penurunan tingkat mortalitas disebabkan oleh meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan di negara-negara sedang berkembang penurunan mortalitas terutama disebabkan oleh efektivitas penggunaan obat- obat modern dan antibiotika. Demikian juga penurunan tingkat fertilitas/kelahiran di negara-negara sedang berkembang lebih disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi yang mantap, pemerintah memang serius terhadap persoalan kependudukan tersebut, sehingga penurunan kelahiran menjadi lebih cepat daripada di negara-negara maju.

Secara umum di negara-negara sedang berkembang, modernisasi lebih dibandingkan dengan industrialisasi sebagai penyebab penurunan fertilitas. Di Indonesia pembangunan keluarga berencana sangat gencar dilaksanakan mulai sekitar tahun 1970-an, di seluruh wilayah yang mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran secara cepat. Demikian pula berbagai program kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak yang mengintervensi penurunan dengan cepat angka kematian bayi, anak, dan kematian ibu. Program perbaikan gizi untuk Balita dilaksanakan dengan baik untuk menurunkan angka kematian anak.

5.3 Transisi Mobilitas Penduduk

Zelinsky (1971), menyatakan ada hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk, di mana mobilitas penduduk tersebut adalah bagian dari proses modernisasi. Transisi mobilitas penduduk dapat dibagi 5 tahap yaitu:

- 1) Fase 1: Mobilitas penduduk sangat sedikit, bahkan tidak tampak kecuali bentuk-bentuk sirkulasi terbatas, seperti tradisi kunjungan sosial, keagamaan
- 2) Fase 2: Mobilitas penduduk ke arah pedalaman membuat pemukiman baru, mobilitas desa- kota mulai tampak akibat dari berbagai aktivitas, mobilita antar kota belum terlihat.
- 3) Fase 3: Mobilitas penduduk ke arah pedalaman mulai menurun, mobilitas desa-kota masih dominan, mobilitas antar kota sudah tampak, mobilitas sirkuler juga sudah terlihat.
- 4) Fase 4: Migrasi desa-kota terus meningkat, terjadi arus tenaga kerja kasar/tidak terlatih dari daerah terbelakang, mobilitas sirkuler tenaga kerja trampil dan profesional meningkat.
- 5) Fase 5: Mobilitas akan turun karena sarana komunikasi semakin sempurna, mobilitas sirkulasi meningkat akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan informasi, bentuk-bentuk mobilitas sirkuler bervariasi.

Teori transisi demografi ini lebih didasarkan atas pengalaman-pengalaman historis yang sebenarnya terjadi di beberapa negara. Pengalaman historis baik yang berkaitan dengan kondisi fertilitas dan mortalitas mengalami beberapa tahap, artinya secara historis perkembangan penduduk senantiasa melampaui beberapa tahap tertentu (Munir dan Budiarto, 1986). Teori transisi demografi tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk menyusun berbagai alasan secara umum dan sebagai pegangan atau acuan untuk mengetahui dan memahami proses penurunan fertilitas dan mortalitas yang dijadikan dasar pada akhirnya dan dimasukkan ke dalam

formula dalam menghitung tingkat pencapaian transisi demografi oleh setiap negara. Nilai GFR dan TFR yang tertinggi dan terendah dari pengalaman negara-negara di dunia dijadikan dasar dalam menghitung pencapaian transisi demografi di setiap negara.

5.4 Definisi Penduduk

Penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumberdaya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumberdaya alam dan teknologi (Mantra, 2003). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa penambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk tinggi terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi di daerah perkotaan yang identik dengan banyaknya penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial. Seringkali masalah yang timbul diperkotaan akibat banyaknya penduduk antara lain kemiskinan, penggangguran, kriminalitas, permukiman kumuh, gelandangan, dan lain-lain. Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah bekerja ekstra keras demi menekan pertumbuhan penduduk dan sebagai PR pemerintah dalam menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya

penyelesaian masalah- masalah yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan merupakan suatu magnet yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari kerja ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga pertambahan penduduk di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk, selain disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut.

Mobilitas penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumberdaya alam dan teknologi (Mantra, 2003). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa pertambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk tinggi terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi didaerah perkotaan yang identik dengan banyangknya penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial. Seringkali masalah yang timbul diperkotaan akibat banyangknya penduduk antara lain kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, permukiman kumuh, gelandangan, dan lain-lain. Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah bekerja ekstra keras demi menekan pertumbuhan penduduk dan

sebagai PR pemerintah dalam menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya penyelesaian masalah- masalah yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan merupakan suatu magnet yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari kerja ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga pertambahan penduduk di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk, selain disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut. Mobilitas penduduk sendiri terjadi karena adanya interaksi antar manusia dalam suatu wilayah ataupun antarwilayah dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut Bintarto (1983) dalam Atik Yuliana, Interaksi adalah terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari kontak ini akan timbul suatu kenyataan baru dalam wujud tertentu. Interaksi sendiri terjadi dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam setiap peri kehidupannya tidak lepas oleh peranan manusia lainnya. Tanpa disadari sejakkecil manusia sudah melakukan interaksi yaitu interaksi dengan keluarga. Interaksi dengan keluarga merupakan suatu bentuk interaksi sosial akan tetapi dalam lingkup yang kecil .Seiring perkembangannya manusia melakukan interaksi yang lebih besar yaitu interaksi dengan masyarakat sekitar (dalam satu desa, dusun, dan kota) lalu berkembang lagi menjadi interaksi antar wilayah, atau bahkan yang lebih besar lagi yaitu interaksi antar negara. Semua itu terjadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia.

5.5 Interaksi Desa Kota

Menurut Bintarto (1990), desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang terdapat pada suatu daerah dan memiliki hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah

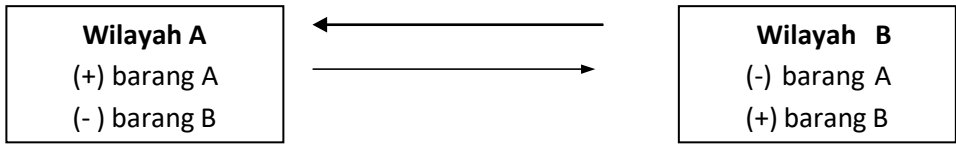
lain. Kota merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis (R.Bintarto). Sedangkan interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih, sehingga interaksi desa kota merupakan hubungan timbal balik antara desa dengan kota guna memenuhi kebutuhan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya interaksi desa kota memiliki prinsip interaksi yaitu terjadinya proses pergerakan sebagai akibat hubungan timbal balik. Pergerakan yang terjadi yaitu meliputi: pergerakan manusia, pergerakan materi/barang, dan pergerakan informasi/gagasan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota. Menurut Edward Ullman dalam Daldjoeni (1998), ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi wilayah.

a. ***Regional Complimentary***

(Adanya salingmelengkapi / komplementaritas)

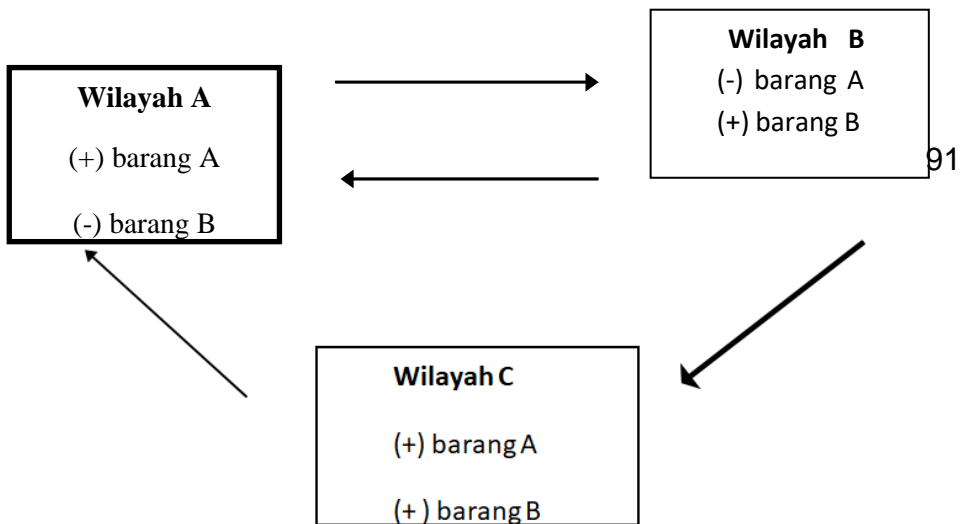
Faktor wilayah yang saling melengkapi merupakan adanya wilayah-wilayah yang mempunyai sumberdaya yang berbeda-beda, sehingga terjadinya interaksi sebagai hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kedua daerah tersebut. Perwujudan dari hubungan timbal balik dapat berupa perdagangan, jasa, ataupun pemenuhan kebutuhan. Manfaat yang dapat dirasakandengan adanya hubungan ini adalah bagi kota masih membutuhkan desa sebagai pemasok bahan makanan ataupun sebagai pemasok bahan baku industri yang terdapat di kota. Selain itu, manfaat bagi perkotaan lainnya adalah terpenuhinya tenaga kerja. Hubungan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan diantaranya adalah kota menjadi tempat pemasaran hasil produksi pertanian ataupun sumberdaya lain dari desa, masuknya teknologi ke desa serta terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa.



Gambar 1.2 Wilayah yang saling melengkapi (*Regional Complimentary*)

b. *Interventing Opportunity* (Kesempatan berintervensi)

Merupakan faktor interaksi yang terjadi disebabkan karena adanya kesempatan berintervensi terhadap daerah lain dalam memenuhi kebutuhannya. Faktor ini dapat menyebabkan terhambatnya interaksi antar wilayah. Sehingga arus komoditas yang terjadi semakin kecil.



Gambar 1.3 Kesempatan Berintervensi (*Interventing Opportunity*)

c. *Spatial Transfer Ability* (Adanya Transferabilitas)

Kemudahan perpindahan (transferabilitas) dalam ruang baik berupa orang/manusia, barang, jasa, ataupun informasi memengaruhi besarnya interaksi. Beberapa faktor yang memengaruhi kemudahan perpindahan ruang antara lain:

- a. Jarak mutlak dan jarak relatif
- b. Biaya/ongkos
- c. Kemudahan sarana transportasi

Ketiga faktor tersebut sangatlah memengaruhi interaksi yang terjadi antar wilayah. Apabila jarak antara dua wilayah sangat dekat maka interaksi yang terjadi antara kedua wilayah tersebut sangatlah besar, dan sebaliknya apabila jarak antara dua wilayah tersebut sangat jauh maka interaksi akan semakin kecil. Jarak biasanya juga memengaruhi ongkos yang harus dibayarkan, semakin jauh maka ongkosnya semakin mahal. Sehingga semakin mudah perpindahan ruangnya, maka interaksi yang terjadi akan semakin besar.

Dalam Daldjoeni (1998), menambahkan bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tiga hal, yaitu:

- 1. Interaksi keruangan merupakan suatu pengertian yang dalam geografi sosial dipakai untuk mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai pengaruh keruangan dari gambaran yang gamblang mengenai pengaruh keruangan dari relasi yang ada antara manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya, bisa menyangkut manusia di kota maupun di desa.
- 2. Interaksi keruangan menyatakan dirinya pada arus manusia, materi, materi dan informasi.
- 3. Interaksi keruangan menyajikan dasar untuk menerangkan gejala lokasi, relokasi, distribusi dan difusi.

Kekuatan Sentripetal (Centripetal Forces)

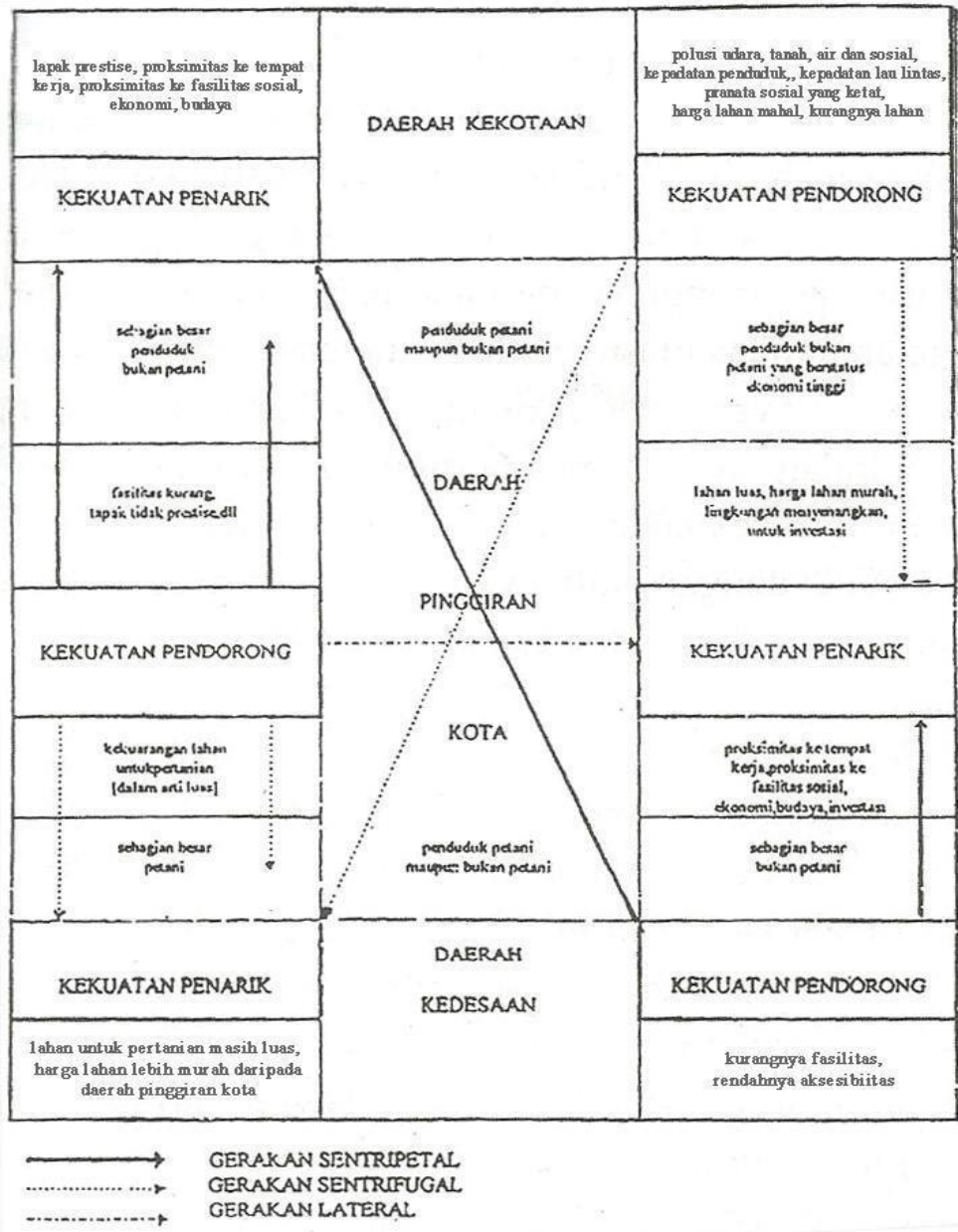
Adanya pedesaan dan perkotaan tidak lepas dengan interaksi wilayah antara keduanya yang secara tidak langsung telah menciptakan suatu wilayah yang memiliki sifat kedesaan dan juga kekotaan atau biasanya disebut sebagai *Wilayah Peri Urban*. Dalam Yunus (2008) mengungkapkan bahwa wilayah peri urban mengandung makna bahwa wilayah tersebut merupakan suatu wilayah yang pada masa akan datang akan menjadi wilayah kekotaan sepenuhnya dengan intensitas dan perkembangan fisik kekotaan sejalan dengan jaraknya ke lahan perkotaan terbangun.

Keberadaan desa selalu berasosiasi dengan lahan pertanian yang berfungsi sebagai sumberdaya penghasil bahan pangan. Sedangkan kota merupakan tempat tinggal manusia yang segala aspek kehidupannya telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan jumlah penduduk. Hal tersebut memberikan suatu konsekuensi berupa permintaan akan ruang. Ruang kota yang sangat padat terbangun tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan didalam lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah membangunnya diluar kota. Akibatnya banyak lahan-lahan pertanian yang hilang sebagai akibat pemekaran kota.

Menurut Yunus (2008), penyebab utama terjadinya dinamika tersebut adalah semakin banyaknya penduduk yang dipengaruhi oleh kekuatan penarik (*magnetic forces/attracting forces*) yang terdapat di perkotaan/daerah tujuan. Daya tarik tersebut semakin kuat sejalan dengan jaraknya terhadap lahan

terbangun. Berdasarkan sebab-sebab tersebut merupakan penyebab terjadinya pergerakan/perpindahan penduduk (mobilitas penduduk).

Berikut ini adalah kekuatan yang memengaruhi pergerakan penduduk dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Model kekuatan dinamis Wilayah Peri Urban (Yunus, 2008).

Kekuatan *sentripetal* merupakan kekuatan-kekuatan yang mengakibatkan gerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar kota menuju ke bagian dalamnya (Yunus, 2008). Kekuatan sentripetal ditentukan oleh dua macam kekuatan yaitu kekuatan pendorong dan kekuatan penarik. Kekuatan pendorong adalah kekuatan yang bersifat mendorong penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal mereka berada. Sedangkan kekuatan penarik adalah kekuatan yang bersifat menarik penduduk untuk menuju tempat di mana kekuatan itu berada dengan kata lain adalah kekuatan yang berada di daerah tujuan. Untuk melihat macam-macam kekuatan pendorong dan penarik gerakan sentripetal dapat dilihat pada tabel 1.14.

Tabel 1.4 Kekuatan pendorong dan penarik gerakan sentripetal

Kekuatan Pendorong	Kekuatan Penarik
Rendahnya kesempatan kerja	Banyaknya kesempatan kerja
Kurangnya fasilitas kehidupan (fasilitas sosial dan ekonomi)	Banyaknya fasilitas kehidupan (fasilitas sosial dan ekonomi)
Kurangnya aksesibilitas	Tingginya aksesibilitas
Rendahnya penghasilan	Tingginya penghasilan
Kurangnya terjaminnya keamanan	Terjaminnya keamanan
Jauh dari tempat kerja	Dekat dari tempat kerja

Sumber: Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota (Yunus,2010)

Langkanya kesempatan kerja dan kurangnya fasilitas kehidupan disuatu wilayah menjadi kekuatan pendorong utama yang menyebabkan mobilitas penduduk meninggalkan daerah mereka berada. Faktanya bahwa kekuatan- kekuatan penarik yang berada di daerah tujuan beberapa diantaranya bersifat *semu*. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa dengan meninggalkan daerahnya menuju tempat di mana terdapat sesuatu yang menjanjikan, namun pada kenyataannya apa yang mereka bayangkan tidak terbukti kebenarannya. Banyak penduduk di desa tertarik dengan kehidupan di kota dengan segala sesuatu didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak kaum muda di desa tertarik dan datang ke kota untuk mencari kehidupan baru disana. Dampaknya sebagian besar petani yang berada di desa adalah golongan usia lanjut bukan usia remaja, sehingga apabila pemerintah tidak bisa memberikan solusi, hal ini akan menjadi malapetaka sosial dan ekonomi dimasa yang akan datang. Friedman dan Douglas (1978) dalam Yunus, menganggap bahwa hal tersebut merupakan dampak dari kesalahan adopsi paradigma pembangunan yang disebut AIDS (*Accelerated Industrialization Development Strategy*)

5.6 Mobilitas Penduduk

Sebelum tahun 1970 tidak banyak diketahui tentang pola perpindahan penduduk di Indonesia karena studi mobilitas pada zaman itu kebanyakan tentang mobilitas menetap atau migrasi. Baru pada tahun 1970 bermunculan penelitian tentang perpindahan penduduk yang tidak menetap. Sehingga diketahui bahwa banyak perpindahan sementara dari desa ke kota atau ke daerah lain. Hal tersebut terjadi bahwa faktor ekonomi dan sosial bersama-sama memengaruhi penduduk untuk berpindah ke daerah lain (Manra, 1984). Menurut Mantra, (2003) Mobilitas penduduk adalah proses

gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut perubahan status sebagai contoh yaitu kenaikan pangkat/jabatan. Sedangkan mobilitas horizontal adalah mobilitas gerak (movement) penduduk melintasi batas wilayah dan waktu- waktu tertentu. Batas wilayah yang umum digunakan yaitu batas administratif.

Mobilitas apabila dilihat dari ada tidaknya niatan menetap di daerah tujuan dibagi menjadi dua yaitu mobilitas permanen (migrasi) dan mobilitas non- permanen (Mantra, 2003). Migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju wilayah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Sedangkan Mobilitas non-permanen ialah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain sudah bermaksud tidak menetap di daerah tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan migrasi ke daerah lain. Dalam Mantra (1984), membagi dua alasan tersebut diantaranya yaitu alasan perkawinan dan non-perkawinan. Orang berpindah dengan alasan perkawinan adalah mengikuti suami atau istri, sedangkan alasan lainnya adalah mencari atau mengikuti pekerjaan, mengikuti saudara, dan transmigrasi.

Terdapat beberapa bentuk mobilitas non-permanen yaitu Nglaju (*commuting*) dan sirkulasi (*circulation*). Kedua bentuk mobilitas tersebut merupakan mobilitas penduduk yang tidak menetap di daerah tujuan mereka. Menurut Mantra (1984), Nglaju merupakan bentuk mobilitas penduduk yang melintasi suatu batas wilayah dalam jangka waktu minimum 6 jam dan kembali pada hari yang sama, sedangkan untuk sirkulasi, jangka waktu meninggalkan daerah asal adalah lebih dari satu hari dan kurang dari satu tahun. Bagi seseorang yang meninggalkan perdukahan lebih dari satu tahun atau lebih akan merupakan migrasi.

Beberapa alasan dikemukakan mengapa orang lebih memilih untuk nglaju daripada mondok atau menginap. Secara umum dikemukakan bahwa penduduk yang melakukan nglaju merasa aman dan tentram apabila berada di tengah-tengah keluarga ataupun sanak saudaranya. Alasan lain yaitu biaya hidup yang mereka dapatkan tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga apabila mereka harus pindah sehingga mereka lebih memilih nglaju di mana biaya hidup lebih rendah dan sekaligus mereka masih dapat mengerjakan sawah dan ladangnya untuk menambah penghasilan.

Selain sebab diatas terdapat berbagai alasan orang melakukan mobilitas. Menurut Ravenstein dalam Mantra (2003), menyebutkan beberapa alasan mengapa orang bermobilitas diantaranya yaitu faktor ekonomi, tingginya pengaruh kekotaan terhadap seseorang, tingginya pendapatan, usia mereka yang masih muda, terdapat sanak-saudara di daerah tujuan dan bencana alam.

5.7 Sistem Informasi Geografis

Menurut Barus dan Wiradisastra, (2000) Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja.

Selain itu, Barus dan Wiradisastra (2000), juga menyatakan secara umumperkembangan SIG ini diawali dengan keperluan kelompok kartografer yang ingin menyimpan data secara otomatis (sehingga mereka juga berperan mengembangkan digitizer yang pertama). Hal ini didukung dengan perkembangan dibidang komputer sehingga muncul CADD (*Computer Aided Design and*

Drafting) yang sebagian besar ditujukan untuk pembuatan peta. Masih dalam kutipan yang sama, dijelaskan pula bahwa setelah CADD kemudian berkembang CAM/FAM (*Computer Aided Mapping/Facilitate Automatic Mapping*) perkembangan keduanya makin mendekati SIG dengan ditambahkannya fungsi- fungsi topologi untuk penelitian, pemetaan dan perencanaan.

Sedangkan menurut Demers (1997) SIG dalam bahasa Indonesia atau GIS (*Geographic Information Sistem*) dalam bahasa Inggris adalah seperangkat alat yang memungkinkan kita untuk mengolah data spasial menjadi informasi dan digunakan untuk membuat kebijakan tentang muka bumi. Sistem Informasi Geografis memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. SIG memiliki subsistem input data yang dapat menampung dan mengolah data spasial dari berbagai sumber. Disamping subsistem tersebut juga berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenisnya (misalnya dari peta garis kontur dapat dijadikan peta titik ketinggian).
2. SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data, yang memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.
3. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data, pengelompokkan dan pemisahan, estimasi parameter dan hambatan dan fungsi pemodelan.
4. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagian dari basis data (*database*) dalam bentuk tabel, grafis dan peta.

5.8 Klasifikasi Potensi Daya Tarik Wilayah

Pengklasifikasian faktor daya tarik dibagi menjadi empat potensi penduduk melakukan mobilitas, antara lain: potensi ekonomi, potensi sosial, potensi kelengkapan utilitas, serta

potensi transportasi. Potensi ekonomi adalah data angka jumlah fasilitas ekonomi, yaitu bank, pasar, industri, dan koperasi. Potensi sosial adalah data angka jumlah fasilitas sosial antara lain: fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat olahraga. Potensi transportasi berupa jalan yang akan diklasifikasikan lagi berdasarkan kelasnya dan juga sarana pengangkut seperti kendaraan pribadi, bus, dan lain-lain.

Harkat terkecil hingga terbesar diberikan kepada golongan fasilitas. Apabila terdapat beberapa golongan fasilitas di daerah penelitian maka harkat tertinggi diberikan terhadap golongan fasilitas yang memiliki potensi besar sebagai faktor penarik, sebaliknya harkat terkecil diberikan kepada golongan fasilitas yang memiliki potensi kecil sebagai faktor penarik mobilitas.

a. Potensi Ekonomi

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, mengingat bahwa adanya keterbatasan/kelangkaan dan ketidakmerataan sumberdaya alam di setiap daerah. Berdasarkan perbedaan potensi sumberdaya inilah yang menimbulkan interaksi wilayah dan ketergantungan antar wilayah untuk pemenuhan kebutuhan wilayah tersebut. Interaksi wilayah diwujudkan yaitu salah satunya dengan pertukaran barang, orang maupun jasa. Potensi ekonomi dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor mobilitas yang disebabkan oleh ketersediaan fasilitas ekonomi di daerah asal maupun tujuan mobilitas. Semakin besar angka perbedaan fasilitas tersebut maka semakin besar pula potensi mobilitasnya.

Potensi ekonomi suatu daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergerakan maupun perpindahan penduduk di suatu wilayah. Wilayah kota/*urban* karena memiliki kelengkapan sarana ekonomi yang lebih lengkap (seperti bank, industri, pasar, koperasi, dan lain-lain) jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan/*rural*. Disebabkan oleh kekuatan pendorong yang

banyak terdapat di pedesaan seperti kurangnya fasilitas ekonomi, rendahnya penghasilan, dan langkanya kesempatan kerja, dapat membuat seseorang melakukan mobilitas ke daerah lain untuk mengambil kesempatan dalam memperbaiki standar hidup dan kesejahteraan keluarganya. Motif lain penduduk melakukan mobilitas adalah untuk melakukan kegiatan perdagangan, di mana penduduk desa menjual hasil pertanian mereka ke kota, ataupun hal lain seperti kegiatan ulang-alik penduduk desa yang pergi ke kota untuk bekerja sebagai pegawai, buruh, jasa, dan lain-lain.

b. Potensi Sosial

Potensi sosial merupakan variabel penelitian yang mempunyai pengaruh dalam faktor penarik dan pendorong. Fasilitas sosial di daerah tujuan mobilitas dianggap sebagai faktor penarik sedangkan fasilitas di daerah asal mobilitas dianggap sebagai faktor pendorong. Semakin besar perbedaan angka fasilitas tersebut maka semakin besar potensi mobilitasnya. Berbagai macam kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat dihilangkan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan.

Kebutuhan pendidikan dan kesehatan sering kali berbenturan dengan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah. Tidak meratanya pembangunan yang terjadi menyebabkan sebagian penduduk yang ingin memenuhi kebutuhan sosialnya harus melakukan pergerakan ke daerah lain, salah satu contohnya adalah mobilitas yang dilakukan oleh penduduk yang menempuh pendidikan di daerah lain disebabkan kurangnya fasilitas sekolah di daerah tempat tinggalnya. Pada sektor pendidikan dibagi menjadi empat kategori yaitu SD, SMP, SMU, dan Universitas begitu pula dengan sektor kesehatan dibagi menjadi Puskesmas atau posyandu dan Rumah sakit.

c. Potensi Kemudahan Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi sangatlah penting demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu sebagai sarana distribusi barang dari produsen hingga ke konsumen. Pada zaman dahulu sarana transportasi yang digunakan berupa kereta kuda dan kereta uap sehingga dalam melakukan distribusi dibutuhkan waktu yang lama agar sampai ke tempat tujuan. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan moda transportasi mengalami perkembangan menjadi modern menjadi lebih cepat dan nyaman. Sehingga saat ini untuk melakukan aktivitas berpergian ke daerah lain sangatlah mudah dikarenakan moda transportasi seperti mobil, kereta, motor dan lain-lain.

5.9 Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif,

yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi:

- Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus-menerus.

Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

5.10 Hubungan antara Penduduk dan Ekonomi

Ekonomi kependudukan pada dasarnya memiliki dua aspek pengertian. Pertama, ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari dinamika penduduk. Kedua, ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan “peralatan ekonomi”. Pengertian dinamika penduduk sendiri mencakup perubahan jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mobilitas dan mortalitas.

Pada pengertian pertama, ekonomi kependudukan mengkaji tentang “posisi” penduduk dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Berbagai teori ekonomi mencoba menjelaskan tentang posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Secara umum “penduduk” ditempatkan sebagai (a) input produksi -dalam konteks menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi, dan; (b) sebagai konsumen yang menggunakan berbagai sumberdaya ekonomi.

Sebagai input produksi, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi direduksi dalam kaitan dengan penyedia tenaga kerja. Itulah sebabnya ekonomi kependudukan pada dasarnya juga mencakup ekonomi ketenagakerjaan. Dalam banyak hal analisis ekonomi ketenagakerjaan bahkan lebih maju dibanding dengan ekonomi kependudukan dalam pengertian yang luas. Demikian berkembangnya analisis ekonomi ketenagakerjaan sehingga

muncul kesan seolah-olah ekonomi ketenagakerjaan menjadi suatu disiplin tersendiri yang terlepas dari ekonomi kependudukan.

Sebagai konsumen, penduduk memiliki peran “menghabiskan” sumberdaya ekonomi yang tersedia. Padahal sumberdaya yang tersedia jumlahnya amat terbatas, dibanding jumlah penduduk yang terus meningkat. Dalam kaitan ini ekonomi kependudukan mengkaji tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah, struktur dan persebaran (dinamika) penduduk. Berbagai kajian telah dilakukan oleh banyak ahli dalam kaitan tentang hal ini. Pada perkembangan selanjutnya kajian ekonomi terhadap terbatasnya sumberdaya alam --relatif dibanding dengan meningkatnya jumlah penduduk-- lebih banyak dibahas dalam ekonomi lingkungan.

Kajian tentang dampak ekonomi dari dinamika penduduk kemudian berkembang dengan melihat karakteristik ekonomi penduduk. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagainya pada awalnya sebenarnya merupakan juga ekonomi kependudukan. Kajian-kajian tersebut kemudian terus berkembang sampai akhirnya muncul sebuah kajian tersendiri yang dinamakan dengan ekonomi pembangunan (development economics). Kajian ekonomi pembangunan bermula dari ketertarikan para ekonom negara maju untuk menganalisis ekonomi negara berkembang yang memiliki karakteristik penduduk berbeda dengan negara maju

Dengan demikian pada aspek pertama, pengertian ekonomi kependudukan pada dasarnya mencakup tema-tema yang dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan. Namun karena kajian tentang ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan sudah demikian maju maka tema-tema yang diangkat dalam ekonomi kependudukan mengambil topik yang lebih spesifik lagi

menyangkut variabel dinamika penduduk yaitu migrasi, mobilitas, ageing dan sebagainya.

Pada pengertian kedua, penduduk tidak hanya sebagai “bagian pasif” dari analisis ekonomi melainkan sebagai “subyek yang dikaji” dengan menggunakan peralatan ekonomi. Topiknya pun lebih spesifik, tidak hanya terbatas pada jumlah penduduk tetapi lebih tajam lagi terhadap (a) struktur dan persebaran penduduk, serta; (b) variabel- variabel dinamika penduduk yaitu fertilitas, mobilitas dan mortalitas. Dalam pengertian kedua ini, ekonomi kependudukan menganalisis “dinamika penduduk” (fertilitas, mobilitas, mortalitas dan struktur penduduk) dengan menggunakan “peralatan ekonomi”.

Dalam pengertian kedua ini ekonomi kependudukan dapat dikatakan menampilkan wajahnya sendiri. Dalam pengertian ini topik-topik yang dibahas dalam ekonomi kependudukan betul-betul berkaitan erat dengan variabel dinamika kependudukan seperti fertilitas, mobilitas dan mortalitas.

Faktor- faktor yang Memengaruhi Pembangunan Ekonomi

Faktor- faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan faktor kunci dalam prosesnya pembangunan, baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian, proses pengorganisasian tergantung kepada kualitas manusia sebagai objek dan subjeknya.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam halpenyediaan bahan baku produksi.

3. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK)

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat bagi sumber manusia untuk mengolah sumber daya alam secara produktif.

4. Sosial budaya

Nilai-nilai sosial budaya sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. nilai - nilai tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan dapat pula menjadi faktor penghambat.

5. Keadaan Politik

Sistem keadaan politik suatu negara berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembangunan.

6. Sistem Pemerintah

Pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis keduanya akan memberikan warna yang berbeda terhadap proses pembangunan.

5.11 Teori Nasionalis, Malthus, Marxis

1. Teori Nasionalis

Kaum Nasionalis beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk akan menstimuli pembangunan ekonomi. Ide dasarnya adalah dengan penduduk yang banyak akan berakibat pada produktifitas yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi pula. Inspirasi pendapat ini didasarkan juga atas pengalaman negara-negara Eropa pada zaman revolusi industri. Pada saat itu kenaikan produksi pertanian selalu diikuti oleh pertumbuhan penduduk. Argumentasinya adalah bahwa dengan penduduk yang banyak akan menyebabkan mereka untuk membuka lahan pertanian yang baru, membangun irigasi, membuat pupuk dan inovasi-inovasi yang lain yang berkaitan dengan revolusi pertanian. Akibatnya produksi pertanian akan naik dengan cepat.

Pendapat ini muncul kembali pada dasawarsa 70-an. Pelopornya adalah Julian L. Simon. Dalam bukunya "*The Economy of Population Growth*", Simon (1977) berpendapat bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pertumbuhan penduduk dalam jangka pendek memang berpengaruh negatif. Kedua, dalam jangka panjang justru pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Argumen ini berdasarkan studinya terhadap beberapa negara di dunia.

2. Teori Thomas Robert Malthus

Analisis dampak pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian khususnya terhadap ancaman kekurangan pangan mendapat perhatian lebih luas ketika Malthus mengemukakan teorinya tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap kecukupan bahan pangan. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population* Malthus mendebat ramalan Godwin tentang suatu masa depan dunia yang sempurna dengan kebutuhan semua orang terpenuhi. Menurut Malthus, hal itu tidak mungkin tercapai karena penduduk cenderung bertambah lebih cepat daripada bahan pangan.

Malthus merasa terdapat konflik antara dua kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan "makanan" dan nafsu antar jenis kelamin (hubungan sex)". Apabila bahan makanan meningkat, maka tanpa dikendalikan, penduduk akan bertambah hingga batas maksimal persediaan bahan makanan. Malthus berpendapat sementara penduduk bertambah searah deret ukur (1,2,4,8,16,...) dalam prakteknya produksi pertanian tidak dapat meningkat lebih cepat dari pada deret hitung (1,2,3,4,5...).

Deret hitung Malthus banyak dikritik, tetapi menurut Parson (1977 Malthus hanya mencoba menunjukkan bahwa penduduk

dapat bertambah lebih cepat daripada bahan makanan, dan suatu waktu pertumbuhan penduduk akan terhambat oleh produksi makanan yang tidak mencukupi.

Robert Malthus berpendapat bahwa proses pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi memerlukan usaha yang konsisten dari rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi yang ditekankannya adalah bahwa perekonomian terlebih dahulu akan mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Menurutnya pula proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Proses akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan para pemilik modal dan bukannya berasal dari pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah, jika pengeluaran untuk konsumsi dikurangi justru perekonomian akan lamban. Menurut Malthus tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi karena pada kenyataannya komoditi dalam jumlah yang besar dipertukarkan secara langsung dengan tenaga kerja daripada dengan komoditi. Dengan demikian ada kelebihan penawaran komoditi di pasar dibanding dengan permintaan. Selain itu ia yakin bahwa penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis.

Malthus memiliki beberapa saran-saran untuk pembangunan ekonomi, saran-saran tersebut adalah:

1. Harus adanya pertumbuhan berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri

2. Harus adanya upaya untuk menaikkan permintaan efektif dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil
3. Perlunya melakukan perluasan perdagangan internal dan eksternal.

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh teori Malthus yaitu:

1. Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal karena pada kenyataannya konsumsi rendah bukanlah suatu gejala tetap namun hanya sementara.
2. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Menurut kenyataan akumulasi modal tidak menyebabkan berkurangnya permintaan atas barang-barang konsumen dan turunnya laba.

3. Teori Neo-Marxist

Kelompok Marxist. Kelompok aliran ini tidak sependapat dengan teori Malthus, karena menurutnya paham Malthus bertentangan dengan nurani manusia. Kelompok ini percaya bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa semua masalah yang berhubungan dengan kurangnya pembangunan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan masalah sosial lainnya, bukan karena pertumbuhan penduduk, tetapi semata-mata sebagai hasil dari ketidakbenaran dari institusi sosial maupun ekonomi di daerah yang bersangkutan. Menurut Marx, pemerintah di negara kapitalis akan mempertahankan pertumbuhan penduduk agar upah tetap rendah. Tetapi di dalam pemerintahan sosialis, hal tersebut tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal ini letak persoalannya adalah apakah suatu negara itu kapitalis atau sosialis. Dan menurut Marxist tekanan penduduk suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist berpendapat semakin banyak

jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan.

Tetapi pengalaman di Kuba setelah revolusi menunjukkan bahwa justru yang terjadi adalah apa yang diungkapkan oleh Malthus. Pada saat itu tingkat kematian kasar melonjak tinggi, usia kawin cenderung turun dan pelarangan terhadap keluarga berencana. Jelas hal-hal tersebut merupakan “Malthusian response”.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

6.1 Definisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai *liability* (beban, *cost*). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemukakan.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan,

pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Sehingga secara menyeluruh, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

6.2 Kinerja Sumber Daya Manusia

SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang bisa dilihat dalam pengertian secara Mikro dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah Karyawan Operasional dan Karyawan Manajerial. Yang masing-masing memiliki peranannya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. SDM tersebut yang akan mengelola jalannya proses bisnis pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal dari seluruh SDM yang ada dan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan yang baik dapat memengaruhi kepuasan kerja pada diri karyawan. Munculnya kepuasan kerja dapat membuat meningkatnya kinerja karyawan.

6.3 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sangat erat kaitannya dengan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna dalam mengatur dan memberdayakan SDM yang ada dan

direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut adalah 11 Fungsi MSDM:

1. Perencanaan, merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, agar lebih efektif dan efisien.
2. Pengorganisasian, pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi wewenang dan koordinasi.
3. Pengarahan (*Directing*), mengarahkan semua karyawan untuk bekerjasecara efektif dan efisien.
4. Pengendalian (*Controlling*), mengendalikan dan mengawasi karyawan untuk taat pada peraturan yang ada.
5. Pengadaan (*Procurement*), yaitu proses penarikan, seleksi, orientasidan induksi karyawan jika diperlukan.
6. Pengembangan (*Development*), yaitu proses peningkatan ketrampilan dari perusahaan bagi karyawan yang biasa disebut pelatihan.
7. Kompensasi (*Compensation*), yaitu penghitungan dan pembagianbalas jasa secara adil terhadap karyawan.
8. Pengintegrasian (*Integration*), Mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras dan tidak bertolak belakang.
9. Pemeliharaan, yaitu proses memelihara dan meningkatkan kondisifisik, mental dan loyalitas.
10. Kedisiplinan (*Dicipline*), pendisiplinan karyawan terhadap peraturandan norma sosial yang ada.
11. Pemberhentian (*Separation*), pemberhentian dari organisasiatau dengan kata lain PHK.

6.4 Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan (dalam bentuk apapun), sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bentuk Kompensasi adalah:

1. Upah atau gaji pokok adalah pembayaran yang diterima karyawan secara bulanan, mingguan, atau setiap jam sebagai hasil dari pekerjaan mereka.
2. Insentif merupakan imbalan yang ditambahkan terhadap upah atau gaji dan biasanya berkaitan secara langsung dengan prestasi kerja, (seperti: bonus, komisi, *profit sharing*, *piece rate plans*).
3. Benefit adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai hasil dari pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi, (seperti pembayaran hari libur, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan tunjangan pensiun).

6.5 Permasalahan Sumber Daya Manusia di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengelolaan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada

tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

A. Keterampilan Ketenagakerjaan Rendah

Kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya. Inti dari kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna.

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina,2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (*Skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. *Abilities* yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Banyak sekali keterampilan kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Diantaranya (*Communication skill*) yaitu keterampilan berkomunikasi yakni kemampuan yang sangat diperlukan dalam dunia kerja sehingga semua perusahaan akan mudah menerima Anda jika Anda memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, menarik dan

menyenangkan; kemampuan penjualan atau (*marketing skill*) yaitu keterampilan di bidang pemasaran yaitu bidang yang menjual produk dan memperkenalkannya kepada khalayak terhadap produk tersebut.

7 Akses Informasi Tenaga Kerja Rendah

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bank Dunia menyoroti fenomena lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja. Fenomena ini disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama dikalangan anak muda yang baru lulus sekolah. Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan, 60 persen angkatan kerja muda terlalu mengandalkan model getok tular alias informasi dari hasil obrolan dengan teman atau keluarga. Hal ini menandakan adanya kesulitan angkatan kerja untuk mengakses informasi soal pasar kerja. Kondisi ini, idealnya harus dijumpai oleh pemerintah atau pemberi kerja. Sebab, ketidaktahuan cara mencari kerja bukan hanya dialami lulusan SD atau SMP, melainkan juga SMA hingga sarjana.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1.hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian

bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Tentunya undang-undang tersebut belum berjalan dengan mulus, menurut Kementerian KOMINFO, terdapat kendala baik dari internal ataupun external diantaranya:

Internal:

- Penyediaan informasi bergantung pada supply data dan satuan kerja
- Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari unit kerja
- Kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik
- SDM kurang memahami dan menguasai teknologi yang berkembang

Eksternal:

- Mekanisme pelayanan informasi publik masih buruk
- Akses informasi yang asimetris
- Kurangnya pemahaman masyarakat
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

8 Lapangan Kerja Tidak Sesuai Tingkat Pendidikan

Salah satu masalah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) adalah keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dunia pendidikan belum mampu menjembatani kebutuhan dunia kerja terkini secara komprehensif. Hal ini pula menjadi penyebab terjadi pengangguran terdidik. Jika kualitas pendidikan bagus dan jumlah lulusan pendidikan membludak, tentu saja akan menimbulkan masalah bila lapangan

pekerjaan yang tersedia tidak memadai. Orang menyebutnya dengan istilah “pengangguran terdidik”. Diakui memang, mencari pekerjaan zaman sekarang tidak mudah. Perlu kesabaran dan ketekunan mencari lowongan kerja sesuai ijazah yang dimiliki.

Di pihak lain, seseorang butuh pekerjaan yang berujung pada pendapatan atau penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Tidak mungkin lagi seorang sarjana bergantung pada orang tua dalam masalah finansial. Tak dapat ditutupi lagi, pendidikan yang telah ditempuh, ijazah yang sudah dikantongi, belum menjamin seseorang untuk langsung diterima di dunia kerja.

Sementara ijazah hanyalah sekadar pelengkap persyaratan administratif. Artinya, dunia kerja cenderung mengutamakan keterampilan, keahlian dan pengalaman kerja ketimbang ijazah. Di samping memiliki ijazah tertentu, mereka perlu mengikuti pendidikan latihan dan keterampilan sehingga siap diterima di dunia kerja. Jika tidak ingin kalah bersaing dengan yang lain, maka bekalilah diri dengan berbagai keterampilan dan keahlian agar bisa diterima di dunia kerja.

Faktor-faktor penyebab kesenjangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja:

8.1 Pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil

Faktor ini merupakan faktor yang paling gampang dilihat. Kesenjangan antara jumlah lulusan dengan lapangan pekerjaan tidak sebanding. Jumlah lulusan setiap tahun kian bertambah, sementara jumlah lowongan kerja naik tidak seberapa, bahkan cenderung stagnan. Solusi yang sering digembar-gemborkan adalah menciptakan lapangan kerja baru.

8.2 Irelevansi Jurusan/keahlian

Kesenjangan antara jurusan/keahlian yang ada di dunia pendidikan dengan dunia kerja. Bisa jadi jurusan yang dalam dua dekade yang lalu output-nya banyak diserap pasar, kini sudah *overflowed*. Penyebabnya karena bergesernya arah dunia usaha dan perkembangan teknologi.

Apabila keadaan ini tidak dicermati, sudah pasti kesenjangan itu akan semakin bertambah lebar. Solusinya adalah mengurangi jurusan pendidikan yang over-quota dan membuka jurusan baru yang lebih dibutuhkan dunia kerja.

9 Kualitas pendidikan yang rendah

Dunia pendidikan kita masih mengutamakan bukti formal berupa lembaran ijazah. Kompetensi diwakili dengan selebar sertifikat. Sayangnya kompetensi itu sering tidak terwakili di situ. Bagaimana mungkin seorang yang memegang ijazah tehnik mesin kapal memiliki kompetensi tentang mesin kapal kalau kampusnya saja jauh dari pelabuhan dan ia sendiri belum pernah melihat fisik mesin itu sendiri. Sangat diragukan bila output pendidikan yang demikian dapat mengisi kebutuhan kerja yang memerlukan kompetensi teknis mesin kapal.

10 Kesempatan Kerja Terbatas

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pengangguran di Indonesia semakin lama semakin banyak. Pengangguran yang banyak terjadi di Indonesia itu sendiri disebabkan karena keterbatasannya lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran sendiri dibuktikan dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Data sensus penduduk yang dirilis Badan Pusat Statistik menyatakan, penduduk usia kerja pada Februari 2010 mengalami peningkatan sebesar 2,76 juta orang dibandingkan Februari 2009, yaitu dari 168,26 juta orang menjadi 171,02 juta orang. Sekitar 67,83 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi dan disebut dengan angkatan kerja yang besarnya mencapai 116,00 juta orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,17 juta orang (1,91 persen) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009, dan meningkat sebesar 2,26 juta orang (2,00 persen) dibandingkan keadaan Februari 2009. Selama satu tahun terakhir peningkatan jumlah pekerja tertinggi terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan yang mengalami peningkatan 2,01 juta orang diikuti oleh sektor industri dengan kenaikan 430 ribu orang.

Jumlah lowongan memang sangat penting dalam memberikan pengaruh tingkat pengangguran tetapi kualitas angkatan kerja juga turut serta dalam memberikan sumbangan dalam banyaknya jumlah pengangguran. Pada saat ini yang sangat banyak diperbincangkan adalah mengenai keterbatasan lowongan kerja bagi peserta kerja. Hal ini tidak sebanding antara jumlah lowongan kerja dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Seperti yang dilansir oleh BPS bahwa terdapat sekitar 1,2 juta atau sekitar 11.7% dari penduduk di Indonesia merupakan pengangguran yang putus asa dalam mencari kerja.

Keputusasaan ini membuat mereka tidak ingin mencoba mencari pekerjaan. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh pemerintah, keterbatasan kesempatan lapangan kerja sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan lapangan kerja. Masyarakat pun harus berfikir taktis, dengan keterbatasannya lapangan kerja masyarakat harus aktif untuk mencari pekerjaan baik manual dan online, selain itu diharapkan masyarakat dapat berbisnis

bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat lain.

11 Upah Kecil

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh. Syarat dalam pemberian upah adalah mampu memberikan kepuasan kepada pekerja artinya mampu memberikan upah yang sebanding dengan perusahaan yang sama, adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki perbedaan akan kebutuhan. Sedangkan tujuan dalam pemberian upah adalah untuk memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat untuk masuk keperusahaan. Meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berbakat serta memberikan motivasi kepada karyawan. Faktor-faktor yang tingkat upah adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Persaingan
2. Biaya Keperluan Hidup
3. Peraturan UU tentang UMR
4. Perbedaan jenis pekerjaan
5. Produktivitas marginal

Di Indonesia, hingga saat ini kebijakan upah minimum masih menjadi acuan pengupahan bagi buruh. Kebijakan upah minimum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 80-an menandai dimulainya campur tangan Pemerintah dalam menentukan tingkat upah. Pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah untuk menuju dicapainya penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja untuk memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan.

Fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menunjukkan bahwa:

- Status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 37,8 juta orang (34,44 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,7 juta orang (17,93 persen), dan berusaha sendiri sejumlah 19,4 juta orang (17,70 persen). Sedangkan status pekerjaan utama yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,7 juta orang (3,39 persen).
- Pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sekitar 54,2 juta orang (49,40 persen), sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan Diploma hanya sekitar 3,2 juta orang (2,89 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15 persen).
- Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah.
- Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu pekerja pada kelompok 35 jam ke atas jumlahnya mencapai 75,1 juta orang (68,46 persen).
- Pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam perminggu persinya relatif kecil yaitu hanya 1,4 juta orang atau sekitar 1,31 persen dari total penduduk yang bekerja (109,7 juta orang).

12. Kualitas Pendidikan Rendah

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia

makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia:

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
2. Rendahnya Kualitas Guru
3. Rendahnya Kesejahteraan Guru
4. Rendahnya Prestasi Siswa
5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
6. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan
7. Mahalnya Biaya Pendidikan

12.1 Rencana Indonesia Dalam Membangun SDM

A. Proyeksi Data Tenaga Kerja

Proyeksi ketenagakerjaan adalah salah satu cara untuk menganalisa pasar tenaga kerja. Proyeksi ini menyediakan informasi penting bagi para pembuat kebijakan, penyedia layanan ketenagakerjaan dan pendidikan tentang gambaran ketenagakerjaan, yang dapat membantu mereka menyusun kebijakan dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, proyeksi ketenagakerjaan dapat digunakan pembuat kebijakan untuk memahami perubahan dan kesempatan potensial yang muncul dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tindakan khusus untuk membantu pekerja dan pengusaha. Proyeksi ketenagakerjaan disusun secara berkala oleh Kementerian Perburuhan di seluruh dunia bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian guna memberi gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan pada tahun-tahun mendatang. Proyeksi ketenagakerjaan biasanya dipilah berdasarkan jenis industri dan pekerjaan, serta latar belakang pendidikan, gender dan daerah. Sebagai contoh, Europe Cedefop secara teratur menyediakan data terperinci dan hasil terbaru perkiraan jangka menengah tentang penawaran dan permintaan keterampilan di sebagian besar negara, yang mencakup proyeksi ketenagakerjaan yang sudah dipilah-pilah.

Metodologi proyeksi ketenagakerjaan:

1. Model Proyeksi Ketenagakerjaan Indonesia (MPKI)

MPKI menerapkan pendekatan Inforum ILO7 dan menggunakan tabel Masukan-Keluaran 2008, data mkro Sakernas dan proyeksi pertumbuhan PDB berdasarkan kategori pengeluaran.

MPKI menggunakan rasio produktivitas yang ditentukan secara endogen atau asumsi eksogen tentang pertumbuhan produktivitas pekerja untuk membuat proyeksi ketenagakerjaan berdasarkan sektor. Model ini menggunakan koefisien industri-pekerjaanstatus, yang mengikuti kecenderungan historis (2007-2012) untuk memperoleh proyeksi di semua variabel ini. Model ini menyediakan proyeksi ketenagakerjaan untuk 22 sektor ekonomi dan untuk pekerjaan di tingkat ISCO 3 digit. MPKI adalah model dari sisi permintaan, dan oleh karena itu tidak menyediakan proyeksi tentang suplai tenaga kerja atau mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan.

2. Model Exponential Smoothing With Damped Trend (ESWDT)

Model ESWDT adalah pendekatan univariat untuk membuat perkiraan yang menguraikan hasil dari waktu ke waktu berdasarkan perkembangan “level” dan “kecenderungannya”. Algoritma ESWDT dilaksanakan melalui program *Microsoft Excel VBA* yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja Australia.⁸ ESWDT untuk Indonesia didasari pada kecenderungan secara historis (1997-2013) yang dimulai dengan survei angkatan kerja untuk pekerjaan dan industri. Model ini tidak mencakup parameter yang terkait dengan jumlah atau pertumbuhan penduduk Indonesia. Proyeksi ketenagakerjaan ini dipersiapkan untuk 9 sektor ekonomi dan 8 jenis pekerjaan.

3. Model Ekonometris Tren Ketenagakerjaan Global (GET) ILO

Model GET ILO adalah model ekonometris multivariat yang menghasilkan perkiraan tentang pengangguran, pekerjaan, status berdasarkan sektor, yang dipilah menurut umur dan jenis kelamin di 178 negara. Model ini menyediakan informasi tentang permintaan dan penawaran agar dapat memahami kecenderungan dalam hal

pengangguran. Dikarenakan cakupan dan tujuannya, model ini hanya menyediakan informasi secara rata-rata.

B. Pelatihan Ketrampilan Kerja

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pelatihan Tenaga Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan para sumber daya manusia dalam bekerja yang disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Selain itu tujuan pelatihan dan pengembangan adalah:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan taraf prestasi tenaga kerja
- 2) Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan baik pekerjaan lama maupun baru, baik dari segi peralatan maupun metode
- 3) Memperkecil kesahalan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja
- 4) Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM
- 5) Meningkatkan semangat kerja
- 6) Menarik dan menahan karyawan yang berkualitas.

Faktor yang Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan SDM

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan

pemerintah, surat-surat keputusan Menteri atau Pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu akan program-program pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan.

b. Sosio-budaya Masyarakat

Faktor sosio-masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apa pun di dirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosiobudaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam mengembangkan SDM dalam suatu organisasi faktor ini perlu dipertimbangkan.

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kemajuan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi dewasa ini telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi harus mengikuti arus tersebut. Untuk itu maka organisasi harus mampu untuk memilih teknologi yang tepat untuk organisasinya. Untuk itu maka kemampuan karyawan organisasi harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut (Notoatmodjo,1992).

C. Penetapan Tenaga Kerja

Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang di butuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang di harapkan. Adapun pengertian penempatan menurut para ahli antara lain:

- Menurut Marihot T. E. Hariandja (2005: 156) menyatakan bahwa: "Penempatan merupakan proses penugasan/ pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas/ jabatan baru atau jabatan yang berbeda".

- Menurut Mathis & Jackson (2006:262) menyatakan bahwa: “Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaannya akan jumlah dan kualitas pekerjaan.
- Menurut B. Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwatno (2003:138). “Penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya”. Maksud diadakan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kemampuan
 2. Kecakapan
 3. Keahlian

Departemen SDM dan para penyelia bertanggung jawab untuk menjaminkaryawan baru tidak:

- Kebingungan karena terlalu banyak informasi yang harus diserap
- Terlalu banyak formulir yang harus dijelaskan
- Diberikan tugas-tugas yang dapat mengurangi minat kerja dan loyalitas
- Diberikan tugas yang sejak awal telah diduga pasti akan gagal dilaksanakan
- Didorong melakukan pekerjaan yang didasarkan pada pemahaman yang salah
- Dipaksa mengisi kesenjangan informasi antara orientasi yang terlalu luas dari departemen SDM dan dirasa sempit oleh penyelia.

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penempatan Kerja

Menurut Bambang wahyudi yang dikutip suwatno (2003: 129) dalam melakukan penempatan pegawai hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai, pendidikan minimum yang disyaratkan meliputi:

- a. Pendidikan yang disyaratkan
- b. Pendidikan alternatif

2. Pengetahuan kerja

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dengan wajar yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut.

3. Keterampilan kerja

Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan dan lain-lain.
- b. Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mekanik dan lain-lain.
- c. Keterampilan sosial, seperti orang lain, mewarkan barang atau jasa dan lain-lain.

4. Pengalaman kerja

Pengalaman seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pengalaman kerja dapat menjadi bahan pertimbangan

untuk:

- a. Pekerjaan yang harus ditempatkan
- b. Lamanya melakukan pekerjaan

Penempatan pegawai merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang lowong dalam suatu organisasi dengan pegawai yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan. Proses seleksi dan penempatan pegawai di dalam perusahaan sesuai dengan bidang peminatan dan keahlian yang dimilikinya juga, karenanya berpengaruh bagi produktivitas perusahaan. Proses seleksi dan penempatan yang baik dan benar akan membuat pegawai memiliki semangat dalam bekerja, karena bidang yang digelutinya merupakan apa yang diminati oleh dirinya dan pekerjaan itu merupakan sesuatu hal yang dikuasai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aidi, H et al., (2016). Population Dynamics and Economic Growth in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development* ISSN 2222-1700 Vol.7 No.15. Department of Economics, University of Nigeria. Nigeria.
- Dr. Rahcmad Budi Suharto.(2020). *Teori Kependudukan*. Samarinda: RV Pustaka Horizon Anggota IKAPI.
- Suharsono Sagir. 1989. *Membangun Manusia Karya: Masalah Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ananta, Aris. 1990. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kompas, 16 Mei 2008. *Sektor Informal Menjadi Penyelamat Antisipasi Tambahan Pengangguran*.
- Arfida, B. R. 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Iryanti, Rahma. 2000. "Pengembangan Sektor Informal Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Produktif," kumpulan makalah, Jakarta.

- Iman Santoso, Perspektif Imigrai Dalam Migrasi Indonesia, Bandung, Pustaka Raka Cipta, 2012.
- Kurniatmanto Sutoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- BP. Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Subanti, Sri dan Arif Rahman Hakim. *Ekonomi kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan: kependudukan dan ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 10. Nomor 1. April 2009:13-33.*
- Greer, Charles R. *Strategy and Human Resources: a General Managerial Perspective.* New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Qustolani (2017). "PENGARUH KEPUASAN KERJA, Keadilan PROSEDURAL DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada Industri Rotan Sekecamatan Leuwimunding Majalengka)". *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi.*
- Muchtar S.P. dkk, Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Yudhistira, 2004.
- Purwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, 1995.
- Migration Policy, Total Immigration and Emigration Population Buletin Studi Ekonomi, 2020 - ojs.unud.ac.id
(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/57879>)

<https://slideplayer.info/slide/11832076/>

[http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan %20LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan%20LENGKAP.pdf)

[https://www.bps.go.id/publication/2020/06/19/43f6d15bcc31f4170a89e571/keadaan- pekerja-di-indonesia-februari-2020.html](https://www.bps.go.id/publication/2020/06/19/43f6d15bcc31f4170a89e571/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2020.html)

[http://subkhan . wordpress.com/2007/11/18/formalisasi sektor-informal/](http://subkhan.wordpress.com/2007/11/18/formalisasi-sektor-informal/) <https://www.hestanto.web.id> > pengertian-sektor-informal

<http://ips-abi.blogspot.co.id/2012/10/migrasi-penduduk.html>

<http://scholar.unand.ac.id/13903/2/bab%20I%20asli%20untuk%20upload.pdf> <https://arfanart.wordpress.com/2011/10/12/jelaskan-pengertian-migrasi/>)

<https://repo.undiksha.ac.id/693/3/1417011007-BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

<https://www.coursehero.com/file/48308484/Makalah-Kependudukan-MIGRASIdocx/>
repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/552/5/128220013_file5.pdf <http://junaidichaniago.pdf>

<http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan%20LENGKAP.pdf>

Tentang Penulis



Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si., menamatkan studi S-3 Doktorat Ilmu Ekonomi pada Universitas Hasanuddin Makassar (2011). Sejak tahun 2005 menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Samarinda.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur.

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain, lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada. Terlebih lagi jika tenaga kerja tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan makin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga makin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Buku *Ekonomi Sumber Daya Manusia* ini merupakan dasar dari Kependudukan dan Ketenagakerjaan, yang tanpa pengetahuan dasar ini tidak mungkin untuk mengembangkan studi lanjutan di bidang Sumber Daya Manusia.



Dr. Rahmad Budi Suharto, M.Si., menamatkan studi S-3 Doktoral Ilmu Ekonomi pada Universitas Hasanuddin Makassar (2011). Sejak tahun 2005 menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Samarinda.

ISBN 978-623-6805-36-7

